



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI  
DENGAN  
KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL, DIRUT PERUM BULOG, DAN  
DIRUT PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)/HOLDING  
PANGAN/ID FOOD**

- Tahun Sidang : 2022-2023  
Masa Persidangan : III (tiga)  
Rapat Ke- : 8 (delapan)  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Selasa, 31 Januari 2023  
Waktu : Pukul 13.26 s.d 17.46 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI  
Gedung Nusantara I (KK-IV)  
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
- Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)  
Acara : 1. Road Map, Rencana Program dan Kegiatan  
Tahun 2023;  
2. Tindak Lanjut Rapat Dengar Pendapat tanggal 16  
November 2022; dan  
3. Isu-isu aktual lainnya.
- Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian  
Sekretariat Komisi IV DPR RI)
- Hadir : A. Anggota Komisi IV DPR RI  
37 dari 52 orang Anggota dengan rincian:  
1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan  
10 dari 11 orang Anggota  
1) Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI  
2) Riezky Aprilia, S.H., M.H.  
3) H. Sunarna, S.E., M.Hum.  
4) Ir. Mindo Sianipar  
5) Ono surono, S.T. (Virtual)  
6) Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.  
7) Drs. I Made Urip, M.Si.  
8) Dr. H. Sutrisno, S.E., M.B.A.  
9) Vita Ervina, S.E., M.B.A.  
10) Maria Lestari, S.Pd

2. Fraksi Partai Golongan Karya  
6 dari 8 orang Anggota
  - 1) H. Dedi Mulyadi, S.H./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
  - 2) H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
  - 3) Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S. (Virtual)
  - 4) Alien Mus
  - 5) Teti Rohatiningsih, S.Sos.
  - 6) Ravindra Airlangga, M.S.
  
3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya  
5 dari 7 orang Anggota
  - 1) Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
  - 2) Ir. Endro Hermono, M.B.A.
  - 3) DR. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS, M.Sc
  - 4) Ir. Dwita Ria Gunadi (Virtual)
  - 5) Dr. Azikin Solthan, M.Si. (Virtual)
  
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat  
3 dari 6 orang Anggota
  - 1) Ir. Abdullah Tuasikal (Virtual)
  - 2) Yessy Melania, S.E.
  - 3) Ir. Hj. Sri Kustina (Virtual)
  
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa  
4 dari 5 orang Anggota
  - 1) Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
  - 2) H. Muhtarom, S.Sos.
  - 3) Daniel Johan, S.E.
  - 4) Edward Tanur, S.H.
  
6. Fraksi Partai Demokrat  
3 dari 5 orang Anggota
  - 1) DR. Suhardi Duka, M.M.
  - 2) Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
  - 3) Muhammad Dhevy Bijak Pawindu (Virtual)
  
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera  
3 dari 5 orang Anggota
  - 1) drh. H. Slamet
  - 2) Dr. H. Andi Akmal Pasluddin S.P., M.M.(Virtual)
  - 3) DR. Hermanto, S.E., M.M.
  
8. Fraksi Partai Amanat Nasional  
1 dari 3 orang Anggota
  - 1) Haerudin, S.Ag., M.H.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan  
2 dari 2 orang Anggota
  - 1) Ema Umriyyatul Chusnah (Virtual)
  - 2) K.H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I. (Virtual)

- B. Anggota Izin  
Fraksi Partai Amanat Nasional
  - 1) Ir. Alimin Abdullah

- C. Pemerintah:
  1. Kepala Badan Pangan Nasional (Arief Prasetyo Adi) beserta jajaran;
  2. Direktur Utama Perum BULOG (Budi Waseso) beserta jajaran; dan
  3. Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ Holding Pangan ID FOOD (Frans Marganda Tambunan) beserta jajaran.

**Jalannya Rapat:**

**KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Bisa kita mulai.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera bagi kita semua.

yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV,  
Yang terhormat Kepala Badan Pangan Nasional,  
Yang terhormat Direktur Utama Perum Bulog,  
Yang terhormat PT Rajawali Nusantara Indonesia atau Holding Pangan/ID Food, serta  
Hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita akan mengadakan rapat dengar pendapat dalam keadaan sehat walafiat.

Sesuai dengan jadwal rapat Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 yang telah diputuskan dalam rapat pengganti Bamus 16 November 2022 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV tanggal 11 Januari 2023, pada hari ini Selasa, 31 Januari 2023, Komisi IV menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Badan Pangan Nasional, Direktur Utama Perum Bulog dan

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia dalam rangka membahas. Mengenai:

1. *Roadmap* dan rancangan program kegiatan tahun 2023;
2. Tindak lanjut rapat dengan pendapat pada tanggal 16 November 2022; dan
3. Isu-isu aktual lainnya antara lain mahalnya harga beras.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) peraturan tentang Tata Tertib, rapat dengar pendapat ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**(KETUK PALU 1 KALI)  
(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.26 WIB)**

Rapat dengar pendapat ini kita mulai pada pukul 13.20 menit, akan diakhiri pada Pukul 17.00. Apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) tentang Tata Tertib dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat;
2. Penjelasan Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog dan Dirut RNI;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban Kepala Badan Pangan Nasional, Dirut Perum Bulog dan Dirut RNI;
5. Kesimpulan rapat;
6. Acara penutup.

Apakah acara dapat setujui?

**(KETUK PALU 1 KALI)  
(RAPAT: SETUJU)**

Rapat dengar pendapat hari ini merupakan tindak lanjut dari rapat tanggal 16 November 2022 yang lalu. Pada rapat tersebut, Komisi IV mendengarkan penjelasan usulan tambahan anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2023 sebesar 1,28 triliun yang mana akan dibahas secara mendalam pada rapat hari ini. Komisi IV juga meminta Saudara Kepala Badan untuk menjabarkan konsep dan peta jalan kedaulatan pangan ketahanan pangan secara terstruktur yang harus terelaborasi di dalam rancangan program kerja Badan Pangan Nasional. Komisi IV meminta agar dalam menyusun program kerja harus didasari dengan semangat mewujudkan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan bukan impor pangan. Selain itu, program kerja yang disusun harus juga berdampak langsung kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah.

Hal lain yang menjadi perhatian Komisi IV adalah terkait kesediaan dan harga pangan. Berdasarkan pemantauan di beberapa tempat terdapat

beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di antaranya daging, bawang merah, bawang putih, minyak goreng hingga beras. Saya jelaskan di sini di Lampung Selatan ada dua kecamatan, Kecamatan Palas dan Sragi itu wilayah paling besar penghasil beras tetapi hari ini di kecamatan tersebut harga beras medium mencapai Rp10.500,00 yang biasanya paling mahal Rp8.000,00 sampai Rp8.200,00 meskipun secara umum harga komoditas pangan pada awal tahun dikatakan stabil selain beras. Namun, Komisi IV menilai harga tersebut adalah stabil tinggi dengan kata lain agak mahal. Hal ini tentu sangat menyulitkan bagi masyarakat terlebih lagi kita akan menghadapi bulan Ramadhan dan hari raya Idulfitri yang berpotensi berdampak peningkatan harga komoditas pangan. Hal ini tentu saja harus segera dicari jalan keluarnya dalam rangka mewujudkan, ketersediaan keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan. Selain itu, Komisi IV mengingatkan kembali agar Perum Bulog melakukan penyerapan beras secara maksimal pada panen raya nanti untuk menjaga stok beras nasional.

Selanjutnya, Badan Pangan Nasional dalam menyusun program dan rencana kerjanya agar kembali melihat Tupoksi utamanya secara cermat. Lalu rancangan program dan kegiatan berdampak langsung kepada masyarakat terukur secara nasional. Buatlah kegiatan yang cakupannya nasional bukan sekedar menyusun kegiatan output masing-masing pusat dan bukan juga dengan memperbanyak impor. Selain itu, agar diperhatikan kembali data ketersediaan dan stok pangan nasional, jangan ada kompromi dalam menyajikan data-datanya karena kalau Badan Pusat Statistik kalau mau merilis berjumpa dulu menyatukan visi seolah-olah sama *enggak* nih datanya. Kalau agak-agak jauh ditarik dikit supaya mendekati.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Demikian pengantar kami sampaikan.

Selanjutnya kami persilakan Kepala Badan Pangan Nasional dilanjutkan Dirut Perum Bulog dan Dirut RNI untuk menyampaikan secara rinci dan terukur hal-hal tersebut yang kami sampaikan di atas. Kami persilakan.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Salam sejahtera,

Shalom,

Om Swastiastu,

Namo buddhaya,

Salam kebajikan,

Selamat sore,

Salam sehat untuk kita semua.

Yang saya hormati segenap Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Dirut Bulog dan Dirut RNI beserta jajaran.

Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Hari ini kita dapat menghadiri Rapat Dengar Pendapat antara Badan Pangan Nasional dengan Komisi IV DPR RI.

Sesuai dengan undangan rapat RDP pada hari ini, maka isu-isu strategis yang akan kami sampaikan yang pertama, izin Pak Ketua, *follow up* dari hasil RDP, 16 November 2022 lalu. Yang pertama, rencana kegiatan dan anggaran Badan Pangan Nasional tahun anggaran 2023 sebesar 103 miliar lebih, *alhamdulillah*. per 27 Januari anggaran tersebut telah dibuka blokir dan dapat digunakan. Namun, masih ada kekurangan anggaran untuk tunjangan kinerja pegawai sebesar 18 miliar. Saat ini dalam proses revisi dengan mengambil dari anggaran program dan paralel menunggu realisasi anggaran belanja tambahan *as proposed*. Yang kedua, terkait usulan tambahan anggaran Badan Pangan Nasional tahun anggaran 2023 sebesar 1,2 triliun lebih seperti yang disampaikan Ketua. Kami telah bersurat kepada Seskab dan baru saja kami sampaikan langsung kepada Pak Presiden untuk pengajuan penganggaran ini dan juga kami laporkan ke Komisi IV. Kemudian secara paralel juga sudah kita diskusikan dengan Bappenas dan juga DJA. Kami mohon dukungan dari Bapak/Ibu Komisi IV DPR RI terkait penambahan anggaran ini sebagai penunjang kinerja Badan Pangan Nasional seperti yang tugasnya sudah disebutkan.

Komisi IV DPR RI meminta Kepala Badan Pangan Nasional untuk menjabarkan konsep dan peta jalan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan secara terukur dalam bentuk program yang akan kita sampaikan berikut ini. Jawaban tertulis sudah kami sampaikan melalui surat per tanggal 22 November 2022 lalu. Berikutnya, Komisi IV DPR RI mendesak Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog untuk memenuhi stok beras minimal untuk CPP/Cadangan Pangan Pemerintah serta mengupayakan kepada pemerintah untuk hilirisasi dan perputaran CPP. Telah dilakukan pengadaan beras dari luar negeri oleh Perum Bulog dengan alokasi 500.000 ton yang sampai kemarin masuk sekitar 242.000 ton dan sisanya masih dalam perjalanan, Bapak dan kemudian diharapkan saat panen raya dimulai, kita sudah selesai dengan importasi. Berikutnya lagi Perum Bulog juga terus melakukan stabilisasi operasi pasar di 26 provinsi yang kalau tahun lalu 1,2 juta ton dan bulan berjalan ini 172.000 ton.

Bapak/Ibu yang kami hormati,

Sesuai dengan permintaan Bapak/Ibu, saya akan menjelaskan kembali terkait pentingnya pangan bagi kita semua sebagai kebutuhan dasar dan pemenuhannya dan pangan ini merupakan pilar utama pembangunan nasional untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial dan politik. Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan sampai tingkat perorangan. Menurut Undang-Undang 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang dimaksud dengan kedaulatan pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perorangan dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam manusia, sosial, ekonomi dan kearifan lokal secara bermartabat. Ketahanan pangan yang merupakan *outcome* dari kedaulatan dan kemandirian pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Badan Pangan Nasional akan berperan sebagai *lead institution* dalam mengorkestrasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan cadangan pangan, stabilisasi pasokan, harga pangan di produsen dan di konsumen, pengentasan kerawanan pangan dan gizi, penjaminan keamanan dan mutu pangan segar serta peningkatan kualitas konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang.

Bapak/Ibu yang terhormat,

Badan Pangan Nasional atau *National Food Agency* menurut Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2021. Mohon maaf, ini Perpres 66 Tahun 2021 merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. Tugas kami tercermin dari tiga kedeputian yaitu Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan seperti yang disampaikan Pak Ketua, Deputi Kerawanan Pangan dan Gizi dan yang ketiga adalah Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan. Kami berfokus pada 9 komoditas beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang merah dan putih, telur, daging ruminansia, daging unggas dan cabai. Kami sedang menunggu revisi Perpres 66 Tahun 2021 untuk penambahan komoditas ikan, minyak goreng, garam konsumsi dan tepung terigu dalam wewenang Badan Pangan Nasional. Saat ini sedang proses harmonisasi antara Kementerian...

#### **KETUA RAPAT:**

Saudara Kepala Badan nanti saya minta dijelaskan juga dari komoditas-komoditas ini ya berapa produksi dalam negeri, berapa konsumsinya dan berapa yang impor, ada kan. Nanti tolong ditampilkan supaya kita terbuka semua seperti contohnya daging sapi ya kan, selalu dibilang swasembada kalau ditambah daging kerbau, impor dari India begitu kan. Nanti tolong dijelaskan, ya lanjut.

#### **KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Terima kasih, Ketua.

Saat ini sedang proses harmonisasi antar kementerian dan lembaga dan telah selesai dilaksanakan dan sedang diajukan untuk persetujuan Presiden.

Selain itu, untuk pengawasan mutu dan keamanan pangan segar, kami bertanggung jawab pada komoditas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 108 ayat (3). Badan Pangan Nasional mendapatkan pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa dari kementerian lain dalam:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan serta penetapan kebutuhan ekspor impor pangan dari Kementerian Perdagangan;
2. Perumusan kebijakan dan penetapan besaran jumlah cadangan pangan pemerintah yang akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara di bidang pangan dan perumusan kebijakan dan penetapan harga pembelian pemerintah dan rafaksi harga dari Kementerian Pertanian;
3. Pemberian kuasa kepada Kepala Badan Pangan Nasional untuk memutuskan penugasan perusahaan umum Bulog dalam rangka pelaksanaan kebijakan pangan nasional.

Jadi saya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional sudah menerima surat kuasa dari Menteri BUMN untuk penugasan Perum Bulog. Bauran kebijakan Badan Pangan Nasional terkait dengan produk, harga, tempat, perbaikan berkelanjutan dan promosi tertuang dalam 4 strategi objektif yaitu ketersediaan mutu dan keamanan, keterjangkauan dan keberlanjutan. Selanjutnya, dijabarkan dalam beberapa *key Initiative*: Yang pertama, mendukung ketersediaan pangan. Kita pastikan penyusunan neraca pangan yang valid, penetapan kebijakan penyerapan produksi dalam negeri serta pengelolaan CPP sesuai dengan Perpres 125 Tahun 2022. Kemudian dalam memastikan mutu dan keamanan pangan, kami bertugas merumuskan standar serta melakukan pengawasan mutu dan keamanan pangan. Secara preventif, kami juga melakukan pengadaan teknologi dan sarana prasarana untuk mempertahankan mutu pangan.

Dalam rangka menjalin keterjangkauan pangan, kami menetapkan kebijakan harga dari hulu ke hilir serta aktif berbagai *extra effort* untuk pengendalian inflasi serta optimalisasi distribusi pangan bersama Kementerian Perhubungan. Kami juga sadar bahwa seluruh sistem ini harus berkelanjutan sehingga diperlukan koordinasi dan kolaborasi dari seluruh *stakeholders* pangan. Secara teknis kami juga fokus pada penganekaragaman konsumsi pangan melalui kampanye B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) serta pengurangan *food loss and waste* yang kurang lebih angkanya sekitar 30%.

Badan Pangan Nasional telah menyusun *road map* rencana aksi dan kebijakan tahun 2022 sampai dengan 2024. Tahun 2022 merupakan *tahun fix the fundamentals* artinya sebagai lembaga baru kami fokus dalam menciptakan organisasi yang inklusif, tangguh dan menginisiasi berbagai program yang solutif mengatasi tantangan pangan. Tahun 2023 adalah masa untuk *reinforcement* artinya memperkuat sistem yang telah kami bangun serta mengeksekusi program-program yang telah direncanakan secara intens. Selanjutnya pada tahun 2024 dan seterusnya merupakan *breakthrough* di mana kami memastikan keberlanjutan eksisting program membuat berbagai



sistem menjadi digital dan otomatis serta memperkuat jangkauan dan peran Badan Pangan Nasional hingga dunia internasional.

Beberapa aktivitas yang kami lakukan di tahun 2023 untuk mewujudkan misi kami di antaranya: penguatan organisasi dan SDM, peningkatan alokasi anggaran, sarana dan prasarana penunjang kinerja, penguatan teknologi informasi dan komunikasi pangan yang akan menjadi rujukan satu data pangan nasional sebagai *early warning system* kebijakan pangan, penguatan hub pangan wilayah untuk pemerataan pasokan dan cadangan pangan, fasilitasi Sarpras, peningkatan plafon pinjaman untuk pengadaan CPP, memperluas *outlet* CPP di BUMN, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, peningkatan volume dan pengelolaan, peningkatan ketersediaan melalui pengendalian *food loss and waste*, percepatan perubahan pola konsumsi pangan masyarakat beragam, bergizi seimbang dan aman dan penjaminan keamanan pangan, edukasi perubahan pola konsumsi dari *fresh food* ke *processed food* untuk memperkuat ketersediaan pangan, pengentasan wilayah rentan pangan, rentan rawan pangan dan gizi minimal 5 kabupaten kota per tahun.

Bapak dan Ibu Komisi IV DPR RI yang kami muliakan,

Badan Pangan Nasional dalam tahun anggaran 2022 telah berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya menjaga mencapai kedaulatan pangan Indonesia. Langkah-langkah tersebut tidak akan berhasil tanpa dukungan dari berbagai pemangku kepentingan terkait dan berikut merupakan dokumentasi kegiatan yang telah kami lakukan tahun 2022. Dalam menunjang program kegiatan tersebut diperlukan dukungan anggaran yang cukup. Sebelumnya, kami laporkan pada tahun anggaran 2022 total penyerapan anggaran Badan Pangan Nasional sebesar 243,7 miliar atau 87,85% terhadap total pagu non blokir 277,4 miliar. Penyerapan anggaran ini memang baru bisa dilakukan setelah Juli tahun 2022 sehingga mohon maaf hanya sampai di angka 87,85% dari Juli sampai dengan Desember.

Pada tahun 2023, kami mendapatkan anggaran total 103 miliar. Jumlah anggaran ini berkurang 215 miliar atau hanya 32,5% dibandingkan tahun anggaran sebelumnya. Anggaran tersebut, kami alokasikan untuk program di 3 deputi dengan total 39% serta untuk dukungan manajemen, gaji dan operasional 61%. Namun, seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, jumlah ini belum termasuk tunjangan kinerja pegawai sebesar kekurangannya 18 miliar. Sebagai pembanding anggaran Badan Ketahanan Pangan yang merupakan embrio Badan Pangan Nasional tahun 2021 sebesar 478,4 miliar dan Badan Pangan Nasional tahun 2022 sebesar 318,5 miliar belum mencakup gaji, tunjangan kinerja serta kebutuhan sarana prasarana perkantoran dasar listrik dan air. Kondisi ini, kami rasakan kurang optimal untuk mendapat mencapai target tahun 2023 seperti yang kami rencanakan dalam *road map*. Maka dari itu kami dengan rendah hati mengusulkan anggaran belanja tambahan sebesar 1,2 triliun lebih untuk dapat secara ideal menjalankan program kami. KBT ini telah kami usulkan kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Setkab dan siang tadi kepada Presiden Republik

Indonesia dan tentunya hari ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Komisi IV yang kami hormati.

Berikut merupakan rincian program dan kegiatan Badan Pangan Nasional tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Melalui penambahan anggaran pada tahun 2023, kami mengusulkan beberapa program untuk kerja sama dengan Komisi IV DPR RI antara lain yang pertama fasilitasi distribusi pangan 69.000 ton atau sekitar 157,3 miliar. Penguatan sarana prasarana logistik sekitar 90 miliar. Intervensi pengendalian daerah rentan rawan pangan 120 110,2 miliar. Pencegahan *stunting* bumil dan batuta ini sebenarnya nanti akan ada koreksi, Ketua karena kalau bumil, batuta ini ada di Kemenkes mungkin nanti yang dengan sekolah seperti *note* berubah menjadi pemberian pangan bergizi untuk anak sekolah menuju generasi emas 2045, Ketua, sebesar 46,1 miliar. Pengembangan desa beragam...

**KETUA RAPAT:**

Yang tadi tolong dijabarkan mekanismenya caranya bagaimana. Saya enggak mau ada anggaran APBN tetapi tidak jelas dan terjadi penyimpangan. Nanti saja jelasinnya.

Ya, lanjutkan.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Baik, Ketua, nanti detail akan kami sampaikan melalui Eselon I dan II kami supaya bisa masuk sampai ke detail.

Izin, melanjutkan, Ketua.

Pengembangan usaha pengelolaan pangan 60 lokasi 18 miliar. Promosi dapur B2SA pusat, provinsi, kabupaten kota 48,9 miliar. Dalam *slide-slide* ini Ketua, Bapak/Ibu teman-teman Anggota Dewan itu kalau dikasih blok kuning itu usulan program kerja sama dengan Komisi IV DPR RI. Jadi kita bisa minta teman-teman dari Komisi IV untuk bisa mengawasi kami bersama-sama di lapangan. Kemudian, koordinasi advokasi dan sosialisasi di bidang standar keamanan dan mutu pangan, ada 35 kegiatan 12,6 miliar dan lebih lanjut kami membuka diri untuk berbagai masukan, saran dan usulan dari Bapak/Ibu Anggota Komisi IV dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 terutama untuk penambahan anggaran agar seluruh program yang direncanakan dapat berjalan dengan optimal.

Untuk isu-isu aktual lainnya Bapak dan Ibu Komisi IV DPR RI yang pertama kami bahas terkait dengan inflasi. Menurut data BPS tingkat inflasi Indonesia Desember 2022 sebesar 5,51% yoy naik 0,09 dibandingkan bulan November tahun 2022. Apabila dibandingkan dengan kondisi di negara-negara lain di dunia, Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil mengendalikan tingkat inflasi dan bahan makanan merupakan salah satu penyumbang inflasi dengan andil yang cukup besar yaitu 1,04% yoy atau 2,06% mom. Komoditas beras, telur ayam dan daging ayam ras menjadi

komoditas dengan andil terbesar. Angka inflasi Indonesia berhasil dijaga berkat kerja keras kita semua.

Berdasarkan panel harga pangan secara umum awal tahun 2023, harga pangan menunjukkan stabil baik di tingkat hulu maupun hilir tapi sebagai catatan seperti yang Ketua sampaikan beberapa produk memang stabil tinggi. Catatan lagi bagi kita semua harga GKP, GKG, beras medium di tingkat produsen juga masih meningkat sejak Juli tahun 2022 serta harga beras medium dan premium di tingkat konsumen sebesar Rp11.600,00. Jadi kalau tadi Ketua sampaikan harganya 11.5 ini memang 11.6 di tingkat konsumen dan Rp13.283,00 per kilo dan perlu juga kita siap-siap untuk minyak goreng dan kedelai yang memang meningkat di atas 10% dibandingkan HET dan HAP-nya.

Kami sangat mengapresiasi kinerja semua pihak yang bersama-sama Badan Pangan Nasional dalam *extra effort* pengendalian inflasi pangan sepanjang tahun 2022 dan kembali mengutip data BPS tahun 2022, ada beberapa catatan penting seperti Indonesia mulai pulih dari pandemi Covid-19, munculnya konflik geopolitik yang menyebabkan pengetatan keuangan sejumlah negara yang menyebabkan inflasi global tetapi dengan berbagai strategi Indonesia secara umum dapat mengendalikan inflasi masih di bawah pertumbuhan ekonomi.

Pada Januari 2022, terjadi kelangkaan minyak goreng. Badan Pangan Nasional bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, BUMN di bidang pangan melaksanakan mobilisasi minyak goreng dengan optimalisasi beberapa tol laut juga menggunakan *private* sektor. Mengantisipasi HBKN Ramadan, Idulfitri tahun 2022, kita juga melakukan mobilisasi stok, stok pangan dari surplus area ke defisit area. Beberapa catatan di tahun 2022 seperti kenaikan harga cabai, bawang ini memang karena disebabkan anomali cuaca dan memang kami sebisa mungkin melakukan mobilisasi stok. Yang ini sebenarnya yang paling ideal adalah produksi di daerah konsumsi tapi pada saat itu belum bisa dilaksanakan, kita akan mau mobilisasi stok dari surplus area ke defisit area termasuk kalau kita lihat mobilisasi stok beras dari Sulawesi Selatan dan NTB ke Jakarta yang dilakukan oleh Pak Buas dan tim. Pada September 2022 terjadi kenaikan harga telur ayam memang disebabkan kenaikan bahan baku dan harga BBM dan melalui rangkaian operasi pasar, kita juga bisa stabilisasi di hilir tentunya dengan bantuan teman-teman peternak layer mandiri.

Sepanjang tahun 2022 Badan Pangan Nasional juga telah menerbitkan berbagai bauran kebijakan berupa Peraturan Presiden dan Peraturan Badan Pangan Nasional di antaranya Perpres 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah serta beberapa per badan terkait harga acuan pembelian dan penjualan kecuali beras, Ketua. Beras kami *hold* dulu walaupun kami sudah ada hitungannya karena harga hari ini memang harga yang di luar daripada kalkulasi kita semua. Kami tunggu dulu Ketua tapi kalkulasi, diskusi antar kementerian lembaga pelaku usaha sudah kami lakukan, Ketua, cuma kami masih menunggu sampai kondisi benar-benar normal, Ketua. Hari ini tidak normal karena gabah GKP sudah 6.000 harga beras medium premium juga di luar dari kebiasaan, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Berarti hari ini harga *enggak* normal?

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Iya, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Disebabkan oleh apa?

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Tidak seimbangnya antara suplai dan *demand*, Ketua, *shortage*.

**KETUA RAPAT:**

Oh, berarti yang surplus itu bohong *dong*.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Nanti saya jabarkan bagaimana KSA kebutuhan dengan bagaimana produksi, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

*Enggak*, saya tanya dulu ini awalnya berarti yang katanya surplus *tuh* bohong *dong*.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Dalam 6 bulan terakhir defisit, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Oke, terima kasih.

Saya paling suka ada pejabat yang jujur dalam menjawab.

Lanjutkan.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Terima kasih, Ketua.

Menurut hemat kami, ada lima dukungan aksi dan kebijakan pemerintah daerah yang dapat dilakukan secara praktis untuk pengendalian inflasi daerah untuk pangan. Yang pertama, penyediaan data pangan di tingkat daerah yang juga harus valid, data pangan sebagai instrumen pengambil pengambilan

kebijakan di daerah, koordinasi dan kerja sama antar daerah, antar kementerian lembaga dalam upaya pengembangan ekosistem dan tata kelola lapangan nasional dari hulu ke hilir. Yang ketiga, mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah defisit melalui mekanisme fasilitasi distribusi pangan. Yang keempat, gerakan pasar murah dan operasi pasar yang dilaksanakan untuk stabilisasi pasokan dan harga di tingkat konsumen dengan memanfaatkan APBD, DAU dan BTT seperti yang sudah dilakukan.

Yang berikutnya penguatan cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan pemerintah daerah melalui penguatan sarana penyimpanan seperti *cold room* atau *river container* kemudian *processing* seperti *heat on dryer* dan *airbrush freezer*, di sentra-sentra produksi pangan untuk memperpanjang masa simpan produk pangan serta di sentra konsumsi untuk menjaga kualitas produk di tingkat konsumen.

Penguatan data pangan dimulai dengan penyusunan prognosa neraca pangan dan menurut prognosa neraca pangan yang kami susun bersama dengan BPS, Kemenko Perekonomian, Kementan dan Kemendag secara umum ketersediaan pangan masih dapat mencukupi kebutuhan nasional tetapi memang beberapa harganya tinggi, Ketua, sehingga *Insyah Allah* Indonesia jauh dari krisis pangan walaupun kita *harus alert*. Meskipun untuk beberapa komoditas seperti kedelai, bawang putih, daging lembu dan gula konsumsi yang ada segitiga merahnya, masih perlu pasokan dari luar negeri dan pengadaan dari luar negeri juga termasuk komoditas beras. Hal ini termasuk isu yang menjadi konsen dari rapat RDP tanggal 16 November 2022 lalu.

Impor beras sejumlah 500.000 ton hanya sekitar 1,6% dari kebutuhan nasional. Dengan adanya impor tersebut, Indonesia sebenarnya masih dikategorikan swasembada beras karena menurut FAO negara swasembada ketika dapat memenuhi kebutuhan pangannya 90% dari produksi dalam negeri. Melihat data KSA BPS, amatan Januari dan sampai dengan Desember 2022, ini yang tadi Ketua tanyakan, memang di 6 bulan terakhir kondisinya kita memang defisit. Dari ketersediaan dari produksi dibandingkan dengan jumlah konsumsi yang rata-rata 2,5 juta ton sehingga kalau kita lihat sampai dengan Januari, kita masih minus 1 juta ton ya. Kemudian tahun 2023 ini kemungkinan *rebound*-nya mulai di Februari bulan depan ini dan Maret dan biasanya Ketua izin menyampaikan pada saat sudah kondisi panen maka akan mengisi lumbung-lumbung dulu sehingga Bulog mungkin terakhir baru akan bisa menyerap. Biasanya akan demikian dan ini berarti masih ada *room* sekitar 2, 3 bulan ke depan. Kemudian Bulog memang kita persiapkan penugasannya Ketua tahun ini menyerap 2,4 juta ton. Jadi saya sudah sampaikan tadi...

#### **KETUA RAPAT:**

Saudara Kepala Badan kalau dengan kondisi, kalau dengan kondisi HPP masih di 82, 83, apakah masih mungkin Bulog bisa menyerap untuk cadangan beras pemerintah? Mungkin Anda masih ingat pada tanggal Rabu, 7 Desember di situ dalam kesimpulan rapat nomor 3: "*Komisi IV meminta pemerintah c.q. Badan Pangan Nasional untuk meninjau ulang harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan beras yang saat ini mengalami*

*perubahan*". Kenapa saya tidak optimis Bulog tidak bisa menyerap? Yang pertama dengan adanya kenaikan BBM belum ada penyesuaian HPP. Dengan adanya kenaikan pupuk belum ada penyesuaian. Dengan adanya kenaikan transportasi belum ada penyesuaian. Jadi kalau 82, 83 rasanya sangat mustahil bisa mendapatkan sampai 2 juta ton sekian. Waktu itu saya sampaikan, saya pikir hari ini tadi Anda ketemu Presiden menyampaikan hal ini dengan tiga alasan tersebut ya. Nanti saja jelaskannya belakangan enggak apa-apa.

Lanjutkan.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Terima kasih Ketua.

Kami juga sudah laporkan kepada beliau bahwa memang kenaikannya tidak langsung serta-merta persis dengan kenaikan BBM dan lain-lain. Angkanya kenaikannya kurang lebih antara 6 sampai 8%, Bapak. Jadi kalau 8.300 konversi atau penambahannya sekitar 6% sekitar 8.800-8.900, Ketua. Di angka itu saya rasa saat panen raya, Bulog bisa melakukan penyerapan. Pada saat, ya ketua, pada saat kita belum melakukan perubahan mengenai HPP harga pembelian pemerintah untuk GKP kemudian GKG dan beras medium, nanti kami akan berikan fleksibilitas harga kepada Bulog, Ketua. Jadi bukan berarti Bulog tidak bisa menyerap dan Bulog tetap menyerap dua, yang satu adalah komersial yang satu adalah CBP dan 2 ini bisa dikerjakan dan kita akan berikan fleksibilitas bila memang pada waktunya nanti memang diperlukan untuk melakukan penyerapan, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Berarti sudah ada persetujuan dari pemerintah?

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Kami baru hitung dan kami sudah sampaikan karena ini kan menyangkut nanti berapa anggaran pada saat CBP. Tentunya akan kami komunikasikan dengan Menteri Keuangan, Menko Perekonomian untuk didiskusikan karena menyangkut

**KETUA RAPAT:**

Jadi judulnya baru diusulkan baru didiskusikan

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Betul, ketua.

**KETUA RAPAT:**

Tetapi belum diputuskan.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Tetapi untuk fleksibilitas harga bisa kita sampaikan.

**KETUA RAPAT:**

Bisa mencapai?

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Bisa.

**KETUA RAPAT:**

Mencapai kurang lebih 89 tertingginya.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Sekitar 6 sampai 8%

**KETUA RAPAT:**

Ya, berarti 89 lah.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Betul ketua dan itu *possible* untuk Bulog untuk menyerap pada waktu itu, Ketua. Jadi angkanya sekitar 88, 89, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Oke, lanjut.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Selanjutnya, kami mendorong penguatan cadangan pangan. Saat ini BUMN pangan sebagai perpanjangan tangan pemerintah hanya memiliki stok pangan yang kecil, Ketua. Jadi, ini stok yang dimiliki BUMN pangan Bapak/Ibu. Kedelai kosong, cabai kosong ya, jagung kosong, bawang putih nyaris enggak ada. *Nah*, dari sini, Ketua, kami siapkan Perpres CPP 125 dan itu sudah siap Ketua dan kami membagi mana yang akan di-*handle* oleh Bulog dan mana yang akan di-*handle* oleh ID Food. Kemudian mengenai pendanaannya juga kami sudah siapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang ada dengan Himbara Ketua dengan *rate* yang rendah untuk bisa digunakan oleh ID Food dan juga Bulog Ketua tetapi secara berkala, jadi Pak Frans di sini di ID Food juga sudah mulai menyiapkan cadangan pangan untuk daging sapi Brazil ke depan dan kemudian cadangan yang lainnya seperti bawang putih kemudian ikan, telur tetapi kita juga harus siapkan fasilitas *cold room*-nya, Bapak karena *enggak* mungkin memiliki cadangan pada saat infrastrukturnya teman-teman

ini belum siap dan saya berharap masih bisa bekerja sama dengan *private* yang memiliki gudang-gudang pendingin.

Berikutnya, Bapak/Ibu Ketua dan Anggota Komisi IV, Perpres tahun... Perpres Nomor 125 Tahun 2022 ini akan menjadi dasar tata kelola cadangan pangan nasional yang saat ini sedang dibangun oleh Badan Pangan Nasional dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan antar waktu, antar wilayah. Upaya pengendalian inflasi dan penanganan daerah rawan pangan, terbitnya Perpres 125 ini juga memperkuat secara teknis berbagai regulasi pendukung.

Mungkin demikian dari kami, Bapak Ketua dan seluruh Anggota Komisi IV yang kami hormati. Kami sangat terbuka terhadap masukan dan koreksi yang membangun dari Bapak/Ibu sekalian.

*Billahi taufik wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Jadi komoditi yang belum masuk ikan sama minyak. Ikan, minyak goreng, telur, terigu.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Ikan, minyak goreng dan terigu, Bapak, kalau...

**KETUA RAPAT:**

Kalau telur itu berapa lama daya penyimpanannya?

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Kalau ikan dalam bentuk frozen bisa cukup lama, Ketua

**KETUA RAPAT:**

Ya saya tahu kalau ikan, kalau telur?

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Kalau telur dengan pendingin bisa sampai 2-3 minggu, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Dengan pendingin?

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Dengan pendingin, Ketua.



**KETUA RAPAT:**

Cukup *enggak* ongkos kemahalan pendingin dengan harga margin telurnya?

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Kalau *refrigerator* dan *cold room* biasanya sekitar 300 sampai 400 rupiah per kilo, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Takutnya nanti karena telurnya dimasukkan pendingin harganya otomatis lebih tinggi karena telur itu maksimum kalau di luar saja batas, batas maksimum laik dikonsumsi itu paling lama 2 minggu atau setengah bulan tanpa *cold room* ya tanpa pendingin ya yang saya katakan ya.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Sehingga Ketua salah satu alternatifnya adalah *processed food*, Ketua jadi *enggak* kita *enggak* bisa hanya telur saja, Ketua. Ini makanya Deputi III kami penganekaragaman pangan ini penting.

**KETUA RAPAT:**

Siapa itu namanya?

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Pak Andriko.

**KETUA RAPAT:**

Terus?

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Jadi salah satu metodenya adalah bukan menyimpan telur saja dalam dalam bentuk *fresh* tetapi juga harusnya ada *processing*. *Processing* itu macam-macam, Ketua, bisa kalau di Berdikari sudah mulai dibuat rendang telur atau dibuat itu *common*, Ketua hanya memang kalau untuk *fresh* *enggak* ada kata lain ya saat ini teknologi yang ada selain dikasih *oiling* di... di telurnya supaya bisa lebih lama, lebih tahan yang lain adalah dengan pendingin, Ketua dan kalau kami dulu di *private* untuk daerah Papua masih bisa kita kirim dari Jawa Timur, Ketua. Jadi itu yang kami lakukan dulu. Memang idealnya adalah produksi di daerah-daerah konsumsi tetapi memang pada saat memang tidak bisa dilakukan kita *door to door* harus kita kirim ke beberapa daerah terutama di Indonesia Timur, Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Karena saat ini banyak keluhan dari peternak telur harganya jatuh. Salah satu kenapa harganya jatuh, ya mohon maaf pemerintahnya belum terlalu fokus masalah telur ayam. Kenapa saya katakan demikian, masih banyak tepung telur yang masuk, betul?

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Betul.

**KETUA RAPAT:**

Saya tidak tahu regulasinya bagaimana. Sebagian besar, pabrik roti *bakery* besar itu menggunakan tepung telur bukan telur segar. *Nah*, ini saya *enggak* tahu ini domainnya siapa. Apakah domainnya Kementerian Perdagangan dengan mengeluarkan SPI begitu saja atau siapa. Saya kurang paham. Nanti tolong dicarikan info, laporkan ke kami. Jadi kalau tepung telur itu disetop iya kan itu kan menguntungkan asing, kenapa *enggak* kita bina agar, agar peternak kecil kita ya harga telurnya tidak terlampau jatuh.

Cukup Kepala Badan dilanjutkan dengan Direktur Utama Perum Bulog.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Terima kasih, Ketua.

**DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG (BUDI WASESO):**

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,  
Yang kami hormati Kepala Badan Pangan Nasional,  
Yang saya hormati Dirut ID Food beserta jajaran,

Memenuhi undangan rapat kerja Komisi IV DPR RI, dengan ini kami sampaikan penjelasan Perum Bulog mengenai ketersediaan dan harga pangan serta isu lainnya.

Selanjutnya terkait penjelasan agenda rapat tersebut, dapat kami sampaikan pada kesempatan ini yaitu yang pertama adalah rencana kegiatan operasional Perum Bulog tahun 2023. Dalam rangka menjaga kecukupan stok pangan atau beras serta memastikan aspek keterjangkauan pangan, Perum Bulog merencanakan kegiatan operasional pada tahun 2023 sesuai dengan RKP perusahaan di antaranya adalah pengadaan gabah dan beras dari petani setara beras sebanyak 1.460.000 ton. Untuk stok CBP sepanjang tahun 2023 sebanyak 1 juta ton, jadi jumlahnya adalah 2,4 juta ton serta penyaluran SPHP bencana dan golongan anggaran sebanyak 1,2 juta ton.

Yang kedua adalah kinerja operasional Perum Bulog. Realisasi pengadaan setara beras pada tahun 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 adalah sebesar 197.865 ton yang terdiri dari pengadaan...

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Ini mohon maaf Pak Dirut. Ini *enggak* ada slidenya ya?

**DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG (BUDI WASESO):**

Sudah kami kirim tadi.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Silakan, Pak.

**DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG (BUDI WASESO):**

Baik.

Dari pengadaan dalam negeri sebanyak 6.073 ton dan impor dari luar negeri sebanyak 191.792 ton. Ini dari yang 3 yang 500.000 ton yang sudah datang. Sedangkan untuk realisasi pengadaan setara beras sampai dengan 31 Desember 2022 yang lalu adalah sebesar 1.051.405 ton yang terdiri dari pengadaan dalam negeri sebanyak 993.989 ton dan impor itu sebanyak 57.417 ton. Dalam rangka menjaga stabilisasi harga di tingkat konsumen, Bulog melaksanakan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP dan kegiatan perdagangan *community* komersil melalui penjualan beras komersil dan komoditas pangan lainnya selain beras.

Adapun realisasi penyaluran SPHP sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 sebanyak 162.770 ton. Stok beras yang dikuasai oleh Perum Bulog sampai dengan tanggal 27 Januari 2023 adalah sebesar 622.851 ton dengan rincian di antaranya stok CBP sebesar 616.360 ton. Stok komersialnya sebesar 6.421 ton. Adapun jumlah stok yang dikuasai ke depannya akan semakin bertambah dengan meningkatnya realisasi pengadaan beras dalam negeri dan luar negeri. Di samping hal-hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa selain melaksanakan stabilisasi beras sampai dengan 26 Januari 2023, Perum Bulog juga turut membantu pemerintah dalam melaksanakan stabilisasi minyak goreng melalui penjualan minyak goreng curah yang mekanisme komersil sebanyak 3.963 kilo liter.

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR yang kami hormati,

Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya kami mohon koreksi, arahan dan petunjuk tindak lanjut. Demikian.

*Billahitaufik wal hidayah,*

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG (BUDI WASESO):**

*Walaikumsalam.*

Baik.

Terima kasih.

Pak Frans, Direktur ID Food silakan.

**DIREKTUR UTAMA PT RNI/ HOLDING PANGAN ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):**

Baik.

Terima kasih.

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang kami hormati,  
Bapak Kepala Badan beserta tim dari Bapanas,  
Bapak Dirut Bulog dan jajarannya, dan  
Bapak/Ibu semua yang hadir pada sore hari ini.

Izinkan kami menyampaikan realisasi program kerja tahun 2022 dan rencana program kerja 2023 terutama untuk anak-anak perusahaan kami yang terkait produksi pangan karena ada beberapa anak perusahaan kami yang lebih fokus kepada trading dan distribusi.

*Next.*

Berikut adalah kinerja operasional dari beberapa produk yang ada di berapa anak perusahaan kami yang terkait produksi seperti untuk gula jumlah tebu yang kami giling di tahun 2022 ada 3,9 juta ton. Kemudian produktivitas tanaman tebu adalah 78 ton per hektar, kemudian produksi gula totalnya tahun 2022 adalah 263 ribu 155 ribu ton. Kemudian untuk sektor peternakan produksi DOC *parent stock* adalah 1.630.000 ekor. Kemudian produksi DOC *final stock* sebesar 11.800.000 ekor. Kemudian untuk garam produksinya untuk garam bahan baku adalah 64.731.000 ton jauh dibanding daripada target produksi karena memang tahun lalu La Nina 3 tahun berturut-turut yang juga dialami oleh tanaman tebu kemudian namun produksi garam olahannya naik menjadi 41.074 ton dibandingkan dengan target kami 35.000 ton.

*Next.*

Di sektor pertanian, terutama di SHS produksi benih totalnya adalah 12.368.000 ton jauh dibandingkan 2021 dan RKP 2023 ini dikarenakan memang untuk SHS mengalami keterbatasan modal kerja dan di tahun lalu ada *refocusing* anggaran untuk penyediaan bibit di Kementan. Tahun ini kami mulai menggarap pasar komersil untuk mengurangi ketergantungan untuk pasar *government*. Kemudian produksi beras jumlahnya 13.223 ton, kemudian perikanan produksinya 10.739. ton.

*Next.*

Kemudian ini adalah beberapa program pangan yang kami lakukan baik kami lakukan di internal ID Food juga sinergi dengan badan pangan dan beberapa BUMN lain seperti Bulog dan PTPN termasuk realisasi giling pabrik gula di tahun lalu dengan luasan 50.853 Ha dengan rendemen 6,61 yang ini adalah dalam 3 tahun terakhir paling rendah. Ini juga karena anomali cuaca di tahun lalu La Nina dan estimasinya tahun ini akan lebih baik karena kondisi cuaca akan lebih panas dari pada tahun sebelumnya. Kemudian seperti kami sampaikan tadi jumlah tebu digiling 3,96 juta ton, kemudian gula kristal putih dengan produksi 263.000 ton.

Kami juga membantu meng-*off take* gula petani di saat harga lelang gula jatuh di bawah harga ketentuan pemerintah sebesar 11.500 di mana di tahun 2022 gula yang kami *off take* dari petani sejumlah 151.904 ton jauh meningkat dari 2021 di mana di awal kami melakukan program ini dengan total 50.000 ton di mana harga belinya di tahun 2022 adalah 11.534 secara rata-rata dibandingkan tahun 2021 10.500. Kemudian realisasi Program Makmur dengan realisasi tanam 275.950 hektar melibatkan 131.438 petani. Kemudian ada juga stabilisasi stok dan harga gula lewat pengolahan *raw sugar* yang kami dapatkan sebanyak 57.000 ton yang menghasilkan gula kristal putih sebesar 53.193 ton. Kemudian di tahun lalu kami untuk pertama kalinya mengimplementasikan sistem resi gudang untuk komoditi gula dan SRG untuk gula ini memang baru dikeluarkan di tahun lalu dan kita sudah mengeluarkan 96 resi dengan total gula yang disimpan 40.202 ton. Ini tujuannya adalah juga untuk membantu petani untuk bisa menunda penjualan gula di saat harga lelang turun.

*Next.*

Kami juga selama tahun lalu, selama ada gangguan distribusi minyak goreng sudah mendistribusikan 90,56 juta liter di 6.500 lokasi di 32 provinsi kurang lebih dari Februari sampai di bulan Juni. Kemudian untuk hilirisasi, kami juga mengembangkan beberapa produk yang sifatnya barang *end product* langsung ke konsumen yang saat ini kami sudah distribusikan baik ke *modern market* maupun *traditional market*. Kemudian di tahun lalu kami juga sudah mulai mengembangkan ekspor walaupun belum besar seperti ekspor ikan dan gurita sebesar 277 ton ke Jepang dan USA. Kemudian ekspor kopi ke Mesir sebesar 238 ton dan ekspor teh ke Taiwan.

Kemudian kami juga terlibat stabilisasi harga gandum untuk pakan bukan untuk makanan sebesar 47.000 ton di tahun di tahun lalu. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Kepala Badan, tahun lalu juga kami melakukan sinergi distribusi pangan terutama di Indonesia Timur menggunakan fasilitas tol laut untuk komoditi gula dan minyak goreng. Kemudian menjelang Hari Raya Lebaran, kami juga memobilisasi sapi-sapi hidup dari Jawa sebelum terjadi PMK dengan total sapi lokal 305 ekor kemudian sapi impor 1.100 ekor.

*Next.*

Kami pindah ke *planning* kerja 2023 ini adalah beberapa asumsi RKP kami di tahun 2023 baik asumsi makro dan mikro seperti yang terlampir di paparan kami.

*Next.*

*Nah*, ini adalah juga target operasional kami di tahun 2023. Untuk komoditi gula target produksi kami adalah 300.433 ton, naik 19% dibandingkan realisasi 2021 dan naik 13% dibandingkan prognosa di tahun 2022 dengan optimisme memang dari prakiraan cuaca di tahun ini kondisi cuaca lebih panas dan itu baik untuk tanaman tebu dan porsi gula. Sedangkan ikan lewat anak perusahaan kami, Perindo target produksi kami adalah 16.087 ton, naik 40% dari realisasi 2021 dan naik 24% dari prognosa 2022. Kemudian untuk benih terutama untuk benih padi target produksinya adalah 19.033 ton, turun dari 43% dari 2021. Namun, naik 11% dari program 2022 di mana kami seperti disampaikan mulai membuka pasar-pasar komersil dan tidak bergantung sepenuhnya pada pasar *government market*.

Kemudian untuk garam target produksi garam tahun 2023 adalah 225.000 ton naik 24% dari 2021 dan 55% dari prognosa 2022. Kemudian untuk DOC target produksinya adalah 19.173.000 ekor, naik 112% dari 2021 dan 22% dari tahun 2022. Sedangkan untuk pencapaian finansial kami target kami tahun ini adalah 17,2 triliun dengan laba bersih 325 miliar. Kemudian Ebitda 1 triliun dan CFO 812 miliar.

*Next.*

Berikut juga Program CPP yang sudah disampaikan Pak Kepala Badan yang kami kerjakan bersama-sama terutama untuk mengantisipasi kelangkaan stok dan harga terutama menjelang hari besar keagamaan. Saat ini kami *update* adalah untuk khusus untuk komoditi-komoditi yang terkait dengan komoditi untuk ID Food, saat ini kami bersama badan pangan sedang menyusun *men-draf* Peraturan Kepala Badan dari Bapanas dengan target nanti di Februari bisa selesai sehingga Program CPP ini nanti di Februari, kita sudah bisa mulai melaksanakan dengan target terpendek adalah untuk persiapan puasa dan lebaran tahun 2023.

*Next.*

Beberapa juga kami *update*, beberapa program investasi kami terutama dengan tujuan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan produksi-produksi pangan yang ada di beberapa anak perusahaan kami seperti investasi pabrik gula untuk revitalisasi dan yang tahun ini kami akan mengoperasikan kembali Pabrik Gula Sindang Laut yang ada di Jawa Barat yang sudah kurang lebih 4 tahun tidak beroperasi, di mana tahun ini produksi tebu kami di Jawa Barat cukup meningkat dan tidak bisa lagi dipenuhi oleh pabrik gula yang existing di Cirebon. Kemudian juga investasi revitalisasi pabrik garam, ini adalah untuk perbaikan pabrik garam di Segoromadu dengan target menaikkan kapasitas produksi dari 500 ton per bulan menjadi 820 ton per bulan. Kemudian investasi pabrik pakan ternak ini pengembangan bisnis *poultry* melalui investasi pabrik pakan sebesar kapasitas 6.500 ton per bulan sebagai *support* untuk kegiatan *on farming* dan kemitraan dengan para peternak.

Jadi kami sampaikan saat ini kami sudah punya satu pabrik pakan di Perindo dan tahun ini kami akan mulai berinvestasi untuk pabrik pakan ternak. Kemudian juga investasi *cold storage* dengan kapasitas 2.500 ton untuk tahap awal yang akan kami bangun di Jalan Yos Sudarso, Jakarta Utara di Kompleks

Pergudangan Berdikari. Kemudian investasi kandang ayam GPS dan PS Broiler dengan kapasitas GPS 36.000 ekor di Jawa Timur, di Jawa Barat dan kandang parent stock kapasitas 200.000 ekor Jawa Barat. Kami sampaikan juga saat ini...

**KETUA RAPAT:**

Saudara Dirut selama ini dapat GPS belum ada kandangnya kan?

**DIREKTUR UTAMA PT RNI/ HOLDING PANGAN ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):**

Menyewa, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Bukan menyewa, kalian jual *kok*.

**DIREKTUR UTAMA PT RNI/ HOLDING PANGAN ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):**

Menyewa, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Yang jujur jawab.

**DIREKTUR UTAMA PT RNI/ HOLDING PANGAN ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):**

Iya, Pak menyewa, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Dapat GPS terus dijual ke sini ke sini orang saya bisa mengecek *kok*.

**DIREKTUR UTAMA PT RNI/ HOLDING PANGAN ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):**

Kandangnya izin, Pak Ketua, nyewa, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Ya, sudah berapa tahun itu dijual. Kemudian kemarin tiba-tiba ada surat dari menteri Anda minta sekian puluh ribu GPS-nya, ujung-ujungnya apa? *over supply*. Kemarin saya bicara sama Dirjen Peternakan, kalau mau harga ayam, bagus telur bagus, dua jalan *cutting* atau dibatasi import GPS-nya. Mohon maaf ini masih ada juga oknum-oknum yang bermain untuk menjadi calo seperti itu ya.

Ya, lanjut.

**DIREKTUR UTAMA PT RNI/HOLDING PANGAN ID FOOD (FRANS MARGANDA TAMBUNAN):**

Terima kasih, Pak Ketua.

Jika nanti punya waktu kita ke Jambi bersama-sama memang ada tapi memang sewa. Terima kasih.

Kemudian yang terakhir adalah juga untuk Program Makmur dengan target 250.000 hektar tidak berubah dari tahun lalu karena kita masih memperbaiki fundamentalnya dengan target keterlibatan petani 106.387 orang dengan komoditas padi, jagung, tebu, sawit, kopi dan inilah sinergi kolaborasi antar sesama BUMN yang terlibat dalam rantai pangan.

Demikian kami sampaikan Bapak/Ibu semuanya. Kiranya kami nanti mohon masukkan dan inputan untuk perbaikan ID Food ke depan.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Baik.

Terima kasih, Pak Dirut.

Bapak/Ibu sekalian,

Sebelum ke para Anggota ya sudah kan ya yang presentasi sudah, sebelum ke para Anggota, saya akan komentari Pak Arief tadi Pak Kepala Badan. Ini senang *sih* karena jadi beberapa waktu yang lalu 2.000 ini cerita ya tapi penting, 2003-2012 ketika kasus stunting Indonesia itu 36,2% kan tinggi banget itu, tingginya gila paling tinggi dan yang sama hanya orang-orang negara-negara Afrika. Kita hampir sama. Padahal, kita luar biasa sumber daya pangannya sebenarnya. Saya punya cita-cita bagaimana karena kita banyak saya lapor juga sama ketua. Waktu itu saya belum jadi Anggota DPR. Jadi bagaimana caranya intervensi pemerintah, baru, jadi bagaimana intervensi pemerintah untuk memberikan makanan yang bergizi kepada anak-anak terutama di SD.

Kalau *enggak* ada intervensi yang mandatory itu susah. Jadi kalau misalnya tadi saya lihat programnya Pak Arief itu, menarik sekali ketika memberikan intervensi kepada anak-anak karena kalau *enggak* ada intervensi susah karena ini masalah budaya kan, makanan ini masalah budaya. Jadi itu ya apresiasi saya dan nanti seperti yang dipertanyakan oleh Pak Ketua tadi bagaimana mekanismenya lalu kemudian memastikan bahwa program atau



intervensi yang diberikan kepada masyarakat itu memang sampai dan memang supaya bisa jadi budaya begitu memakan makanan yang berkualitas, itu pertama.

Lalu kedua untuk Pak... Pak Buas, Pak Dirut Bulog. Beras yang ada masih 250 atau 200, Pak yang sudah hadir impor? 249. Tadi ya 249. Pak Ketua sekali lihat langsung hafal ya, wiridannya apa, Pak. *Nah*, sedangkan sebentar lagi kita akan mendapati panen, itu kira-kira gimana ininya antisipasinya seperti apa terutama untuk tentu untuk harga lalu kemudian juga untuk penyimpanannya itu seperti apa karena kan sudah menjadi mandat. Tadi kan sudah agak lega-lega kan ya pak ya harganya apa HPP-nya sudah sudah bisa bernafas kira-kira begitu bisa menyerap yang lebih optimal lah. Itu saja nanti mohon untuk dijawab.

Saya berikan kesempatan kepada Bapak/Ibu para Anggota untuk memberikan respons dari beberapa presentasi dari para mitra.

Pak Suhardi Duka, silakan.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua,  
Kepala Badan Pangan Nasional,  
Dirut Bulog,  
ID Food dan hadirin sekalian yang saya hormati.

Badan Pangan Nasional ini memiliki kewenangan yang cukup baik besar ya karena mengambil kewenangan dua kementerian, kewenangan Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan di sektor pangan. Pasal 28, Anda membuat neraca pangan ya kewajibannya, merumuskan dan menetapkan stabilisasi harga kebutuhan pokok ekspor dan impor pangan antara lain Bapanas sebagai regulator dan operator Anda adalah Bulog, ID Food dan lainnya. Pertanyaan saya, Bulog memberikan jawaban bahwa dia mengimpor beras itu berdasarkan Ratas, harusnya kan berdasarkan dengan perintah Kepala Badan bukan Ratas. Kalau Ratas terus menjadi menjadi pedoman bagi Bulog ya apa gunanya Badan Pangan ya kan. Kan Badan Pangan baru Bulog operatornya iya, selalu patuh pada Ratas.

Selanjutnya, saya juga tanya kepada Saudara Bapanas, data apa yang Saudara gunakan dalam menentukan neraca pangan? khususnya beras. Kan seharusnya dari dasar neraca pangan, baru kita menentukan surplus atau defisit. Kemudian Anda memerintahkan impor kalau memangnya defisit. Siapa yang diperintahkan apakah itu Bulog atautkah ID Food atau siapa operator Saudara.

Yang kedua, dalam keputusan Bapanas Anda menentukan harga penjualan di tingkat masyarakat. Dengan demikian Anda mengendalikan pasar. Indonesia ini kan pasar bebas ya, Anda melawan hukum *demand and supply*

ya. Saya oke, saya tidak larang tapi pertanyaan saya apa Anda mampu mengendalikan pasar. Kalau Anda menguasai produksi 60% ke atas bisa saja Anda mengendalikan pasar. Anda mau menguasai pergudangan, Anda menguasai produksi, bisa Anda mengendalikan pasar tapi kalau hanya 10% hanya Bulog gudangnya Bulog yang anda andalkan di mana Saudara bisa mengendalikan pasar. Tiba-tiba harga apa namanya hujan panjang produksi cabai tidak ada maka cabai naik Rp50.000,00 ya *ndak* bisa Anda kendalikan.

Jadi saya ingin tahu bagaimana caranya Saudara mengendalikan pasar di tengah anda tidak menguasai stok, Anda tidak menguasai produksi. Saya melihat yang masih menguasai stok adalah mafia pangan. Kehadiran Bapanas ini kami, Komisi IV sebenarnya mengharapkan adalah bagaimana Saudara bisa berhadapan dengan mafia pangan itu. Anda kalahkan dia ya, Anda kalahkan dia karena sekarang ini yang menguasai ya Pak Buas juga mengakui bahwa ada mafia pangan ya. *Nah*, di sini peranan Saudara Badan Pangan Nasional kalau di Komisi IV ini ada Maria ya bukan mafia ya atukah memang ada di Komisi IV ini mafia pangan. Ini juga kan perlu dipertanyakan.

Ya, jadi saya minta buat kebijakan, alokasikan anggaran yang memang bisa berhadapan *apple to apple* dengan mafia pangan dengan memanfaatkan ID Food, memanfaatkan Bulog dan lain sebagainya yang Anda kuasai termasuk kebijakan pemerintah agar pangan ini petaninya tidak terus-terus miskin tapi mafianya terus-terus kaya. Ini kan yang kita hadapi sekarang bangsa sekarang ini. Petani kita miskin terus tapi mafianya-mafianya yang kaya. *Nah*, sekarang kira kurangi peranan mafia pangan ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani kita. Di situlah saya harapkan kehadiran Badan Pangan Nasional bersama dengan Bulog bersama dengan ID Food.

Anggaran Saudara hanya 103 miliar, tidak cukup memang. Anda meminta tambahan 1,2 triliun, yakinkan kami manfaatnya apa ya. Apa manfaatnya, apa dampaknya terhadap 1,2 triliun itu. Ya, tadi Ibu mengatakan ada *stunting* ya, *stunting* ya *stunting* itu juga bukan hanya persoalan gizi, persoalan genetik juga. Kalau bapaknya pendek jangan harap anaknya tinggi ya kan. Kalau bapaknya pendek mana mau anaknya tinggi.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

*Enggak, saya enggak setuju itu. Saya enggak setuju. Enggak, enggak saya enggak setuju. Itu enggak benar itu. Scientific-nya tidak harus di harus di scientific-nya enggak begitu, Pak.*

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Iya tapi faktor genetik juga sih.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

*Enggak bisa, enggak bisa. Nanti kita bicarakan, diskusi.*

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Oke saya setuju. Mari kita atasi *stunting*. Ya saya setuju, saya setuju.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Saya ngomong ini itu dan itu *enggak*, sedikit sekali bahkan *enggak* ada.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Ya saya setuju, saya setuju. Mari kita atasi *stunting* ya.

Hanya saja memang perlu, jangan tersinggung Pak ya. Jangan tersinggung, Pak. Saya ingin supaya anggaran 1,2 triliun yang Anda ajukan itu betul-betul fokus, ya fokusnya bagaimana sehingga dengan demikian katakanlah yang menyebabkan salah satu persoalan disparitas harga di tingkat provinsi itu adalah masalah transportasi, ya. Harga di Sulsel dengan di NTT beda *dong* ya karena Sulsel, Sulbar penghasil beras tapi NTT ya bagaimana di mana kebijakan pangan nasional. Mungkin ada subsidi transportasi yang Anda usulkan kepada pemerintah supaya disparitas harga di NTT dan di Maluku dan lain sebagainya itu bisa menjadi sama. Sama dengan Pertamina menjual minyaknya sampai ke Irian Papua itu sama. Ini yang kita harapkan dari Saudara-Saudara.

Yang terakhir adalah yang terakhir saya minta kepada Badan Pangan Nasional supaya bisa mengontrol dengan baik seluruh perangkatnya ya seluruh operatornya supaya dapat mendorong produksi mulai dari hulu sampai dengan hilir walaupun memang produksi itu tidak terlalu menjadi tugas Saudara tapi tadi dari ID Food sudah bikin ini, bikin itu, bikin itu. Saya kira itu yang paling penting tapi jangan mengharapkin anggaran dari pemerintah tetapi Anda bisa mendorong itu supaya tapi kebijakan pemerintah yang anda andalkan dan paling terakhir bagaimana saudara bisa bekerja sama dengan Komisi IV. Anda baik, kami baik.

Terima kasih.

*Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq,  
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

*Walaikumsalam.*

Terima kasih, Pak SDK. Nanti kita ngomongin tentang *stunting* ya apakah ada genetik atau sebenarnya intervensi dari. Satu minggu ini di Kompas ngomongin *stunting* coba dibaca *deh*, itu ngomongin tentang *tengkes* ya sekarang bahasanya dan itu murni 100% intervensi kita untuk meningkatkan kualitas anak kita.

Eyang silakan.

**F-P. GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):**

Terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Salam sejahtera untuk kita semua,  
Shalom,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebajikan dan tidak lupa *nih* Salam Indonesia Raya.

Yang terhormat Pimpinan kita dan Wakil Pimpinan kita juga sahabat-sahabat kita Anggota Komisi IV dan khususnya di sini Kepala Badan Pangan Nasional, Direktur Bulog, Direktur ID Food, para deputi dan jajarannya.

Kami dari Fraksi Gerindra membahas pak tentang masalah ini khususnya yang diselenggarakan pada Raker tanggal 16 Januari. Di situ Mentan menyebutkan selalu produksi beras 2022 berhasil melampaui target. *Nah*, padahal kita punya Bapanas ini. *Nah*, jadi kami ingin tahu, Pak bagaimana *statement* Mentan itu bisa Bapak kritisi dari Bapanas karena kenyataannya terus kita impor 500.000 ton. *Nah*, saya kasihan dengan Pak Buas karena jadi polemik, Pak, di masyarakat. *Nah*, mohon Bapanas Kabadan Bapanas bisa memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat, Pak.

*Nah*, kemudian tadi diungkapkan juga tentang HPP, Pak. *Nah*, mohon HPP ini juga ditentukan, Pak, karena masyarakat juga menunggu dan tadi diungkapkan oleh Pak Suhardi Duka kita kan inginnya petani kita ini sejahtera, Pak. *Nah*, tentu saja kesejahteraan ini harus diikuti dengan tadi pola-pola Bapak yang bagus untuk hilirnya. *Nah*, kemudian juga bencana ini, Pak terutama Cianjur ini ada bencana nasional ini. Apa kiat-kiat, Bapak. *Nah*, kemudian dengan adanya keanekaragaman hayati kita yang nomor 2 di dunia mestinya ada pola khusus dari Bapanas ini bagaimana membentuk kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga tadi *stunting* itu kan tidak hanya dari pangan darat saja tapi dari perikanan juga perlu dihidupkan kembali. *Nah*, banyak sekali program-program bioflok dari Kementerian Perikanan dan Kelautan dan Perikanan yang belum diakses oleh Bapanas. *Nah*, padahal hilirnya itu penting, Pak.

*Nah*, tadi Ibu Wakil Ketua kita sudah menjelaskan bahwa makanan ini pak makanan di sekolah. *Nah*, ini ternyata jadi polemik juga, Pak, selain untuk mengurangi anti-*stunting* juga gizinya, Pak. *Nah*, juga meminta penjelasan kita tentang Perpres Percepatan Keanekaragaman Pangan. *Nah*, apakah tiap desa yang punya potensi lokal itu sudah Bapak inventarisasi, sudah Bapak tinjau karena di sini Pak Buas saja sudah aktif membuat kopi.

*Nah*, mudah-mudahan, Pak, dengan adanya Bapanas ini tentu saja program-program keanekaragaman pangan dan hayati kita menjadi prioritas utama.

*Nah*, yang berikutnya tentang Tunkin, Pak tadi tunjangan kinerja. *Nah*, saya banyak sekali dapat WA dari junior-junior kita yang belum dibayar ini, Pak. *Nah*, saya sudah *forward* juga ke beberapa deputi untuk menjelaskan bagaimana rencananya program tersebut sehingga bisa terakumulasi dengan baik karena mereka gelisah, Pak, malah pada mau keluar. *Nah*, kemudian pengendalian stok pangannya, Pak, menjelang hari besar dan juga bencana, Pak, apakah sudah ada inventarisasi data karena kami di Cianjur saja mengalami kesulitan. Padahal, dekat dengan Jakarta.

Demikian.

Terima kasih.

*Billahi taufik wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih, eyang.

Selanjutnya Ibu Alien.

**F-PG (ALIEN MUS):**

Baik, Ketua.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Selamat sore,  
Salam sejahtera bagi kita semua,*

Yang saya hormati Ketua Pimpinan saya Bu Anggi,  
Bapak/Ibu Anggota Komisi IV,  
Bapak Arief,  
Pak Buas,  
Pak Frans beserta jajarannya.

Tentunya tadi semua yang sudah dipaparkan, saya juga melihat ada beberapa data yang disampaikan ke kami, data yang disampaikan *alhamdulillah* sama-samalah maksudnya tidak ada perbedaan baik pun realisasi terus produksi dan juga hasil dari penyerapan tahun 2022 dan *targetting* di tahun 2023. Yang saya ingin sampaikan Pak Arief karena kita masuk tahun 2023 yang *Insya Allah* sebentar lagi kita masuk Bulan Suci

Ramadan, bulan Maret tentunya kita harus mengetahui persis posisi kekuatan pangan kita ketersediaannya seperti apa. Menjadi *big question* sekarang karena kita baru saja satu provinsi kita terima tadi menyampaikan bahwa di daerah sudah inflasi gila-gilaan. Kenapa seperti itu? karena memang sudah waktunya dan sudah mau mendekati musim-musim panen dan juga mau memasuki Bulan Suci Ramadan biasanya seperti itu dan juga atensi *warning* yang dilakukan oleh Bapak Presiden dari tahun 2022 takutnya terjadi resesi.

Ini akan berdampak besar kepada negara kita, Pak. Kenapa tadi saya sangat setuju dengan permintaan ketua. Sebenarnya kebutuhan kita impor pangan itu berapa persen sesuai kebutuhan yang kita butuhkan di dalam RI ini. Kemudian di situ baru kita bisa melihat *targetting*, produksi, industri pangan di Indonesia kita seperti apa presentasinya sehingga kita butuh impor dari luar. Di luar dari kedelai itu pasti sudah sudah harus diimpor. Kemudian saya melihat bahwa tadi ikan juga sudah masuk dalam presentasi Bapak walaupun masih dalam tahapan untuk masuk peraturan komoditi pangan tapi ini harus didorong. Jangan sampai *quote by quote*, kita *enggak* tahu. Saya melihat berita di luar negeri semua negara-negara hampir 60 sampai 70% sudah mengalami krisis dan inflasi yang gila-gilaan. Jangan sampai negara tujuan kita impor juga menutup impor dan kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk kebutuhan kita di dalam negeri.

Kemudian tadi sudah disampaikan beberapa hal soal penganggaran yang dianggarkan untuk Bapanas. Terus terang, Pak, dari awal saya merasa bahwa Badan Pangan Nasional butuh dibutuhkan tidak juga tidak apa-apa karena sebelum ada Bapanas sudah ada juga kok Bulog ada juga ID Food, Berdikari dan sebagainya tapi kalau seandainya kehadiran Pak Arief ini bisa memberikan solusi bagaimana kita punya pangan di Indonesia, saya apresiasi yang luar biasa sangat. Kita berbicara sebentar lagi masuk panen, Pak Buas, tadi singgung soal HPP yang setahu saya sudah tidak di harga Rp8.800.00 tertinggi Rp10.000, 10.000 berapa Bu Febi tadi? 10.000 lebih ya 10.500 apa 100 10.2, berarti ini sudah tinggi. Bagaimana dengan harga gabah kering giling di petani. Ini harus di... tadi saya *enggak* tahu rapat hasil rapat dengan Presiden seperti apa tapi mudah-mudahan ini juga sebagai pembahasan utama karena kalau tadi Pak Arief sampaikan kalau 2,4 juta ton yang harus diserap dan dipersiapkan oleh Bulog tahun 2023, saya yakin tidak ada lagi impor tapi ingat masalah yang tahun 2022 ini bisa terulang kembali *enggak*. Kenapa? BPS bilang surplus yang semua kita menggunakan data tersebut. Pertanian bilang surplus, keadaan di lapangan kita bilang defisit, yang ada terjadi kita saling mencurigakan satu sama lain. Hati-hati. Saya minta dengan anggaran Bapak yang katanya masih kecil juga kalau bisa juga ditambahkan, tolong turun ke lapangan bersama dengan kalau di Bulog itu apa ya namanya ya, Satgas Pangan melakukan *live streaming*, Pak, sehingga data bukan hanya data di atas kertas tapi data yang realita apa adanya bukan adanya apa ini.

Kemudian Pak Ketua, Bu Ketua, saya ingin menyampaikan bahwa kita kan sekarang lagi bagaimana kemarin kita rapat bersama dengan Pertanian. Pak Arief sudah punya belum data rangkaian atau perencanaan Dirjen Tanaman Pangan di Pertanian?

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Belum punya detail, ibu.

**F-PG (ALIEN MUS):**

Kalau belum punya detail, saya harapkan data yang Bapak *targetting* di tahun 2023 dilihat kembali berdasarkan data yang akan disiapkan oleh Pertanian agar korelasinya terbaca terdeteksi. Itu di beras, Pak. Tadi saya melihat Bapak juga memaparkan bagaimana dengan bawang, dengan tadi dari ID Food juga menyampaikan soal gula kristal dan sebagainya. Saya ingin menggarisbawahi, Pak Arief, kan kita punya hampir 11 sampai 13 komoditi andalan pangan kan ya. Harusnya Badan Pangan Nasional sudah memprediksikan tapi tentunya harus sesuai dengan data yang dilampirkan oleh Pertanian. Kebutuhan tahun 2023 baik bawang merah, bawang putih, bawang bombai, cabai kering, cabai keriting, cabai yang kecil-kecil. Kalau itu orang di orang timur bilang cabai apa kalau di sini cabai rawit ya kalau di sini. Kalau itu orang bilang rica alus iya. Itu juga menjadi kebutuhan.

Kemudian kalau sudah kita *targetting* seperti itu korelasi datanya pencapaiannya produksinya kita masuk di hilirisasi pasar walaupun mungkin Badan Pangan Nasional tidak bisa mencampuri langsung dengan harga tapi kalau memang daerah Timur masih bagian dari Indonesia, saya harap harganya *tuh* jangan terlalu jauh perbedaannya. Di Jawa misalkan 1 liter beras bisa 8.000 sampai 9.000 tapi kita di Maluku, Maluku Utara bisa 13.000 sampai 14.000 ditambah ongkir, ditambah apalah itu ya sudah. Gula sama, minyak goreng sama, itu kemarin saya, Pak Frans ternyata *enggak* bisa juga jual harga seperti itu. Ongkir ongkosnya transportasinya terlalu besar sehingga walaupun kita belinya 14.000 kalau memang Pak Presiden bilang satu harga, satu harga itu harga yang mana yang dipakai. Harga yang sampai di pasarkah atau harga yang cuma keluar dari distributornya. Ini kadang-kadang kita *enggak* lihat bagaimana keadaan Indonesia punya pulau-pulau daerah-daerah, heran saya.

Kalau sudah seperti itu tadi Pak Arief juga menjelaskan tentang telur masa berlaku dan ketahanannya. Mungkin Pak Buas juga sering main di Indonesia Timur dan pernah bertugas Indonesia Timur. Kita Indonesia Timur khususnya Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, telur yang dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di sana rata-rataambilnya dari Sulawesi Selatan, Surabaya ataupun Manado yang konon katanya itu sudah juga tidak layak dikonsumsi tapi kebutuhan masyarakat mereka tetap membeli. Ini menjadi kalau memang harus mau lihat lagi bagaimana kondisi kita ya harus semua, Pak. Kalau jagung, beras, ayam, semoga mudah-mudahan di tahun 2023 ini awal-awal Maret, bulan Februari memasuki awal Maret ini jangan naik harganya ini. Kalau naik berarti ya sudah orang sudah susah tambah mau belinya susah yang ada adalah lapar. Kalau sudah lapar semua bisa terjadi karena di samping saya ini ada Mas Ravindra yang mau menambahkan. Izin Ketua mungkin beliau bisa menambahkan apa yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih Pimpinan.

**F-PG (RAVINDRA AIRLANGGA, M.S.):**

Izin, hanya ingin menambahkan sedikit tentang *stunting*.

Tadi saya bahagia bahwa Badan Pangan Nasional memiliki program untuk menangani *stunting*. Saat ini Indonesia 20% lebih itu banyak balita mengalami *stunting*. Nah, ini program yang dicanangkan apabila terjadi penambahan anggaran adalah pemberian pangan bergizi untuk anak sekolah. Mungkin saya juga mohon izin karena *stunting* itu ditangani harus sebaiknya 1.000 hari pertama. Jadi dari usia kehamilan, dari kehamilan sampai anak berusia dua tahun. Ini adalah *golden period* untuk menangani *stunting* jadi sehingga mungkin mohon izin apabila ada program ditargetkan ke ibu hamil juga dan pada *golden period* ini dan kemudian juga sedikit dengan konsumsi protein hewani dan juga karbohidrat kompleks juga.

Mungkin, sekian.

Terima kasih.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Ditanya sama ketua, memang sudah. Terima kasih. Iya 1.000 hari pertama kehidupan itu penting. Jadi sebelum hamil bahkan kalau ditarik ya ketika remaja kalau kita, kalau remajanya konsumsi makanannya seimbang dia akan menjadi calon ibu atau calon bapak yang akan melahirkan... anaknya sudah 4 ini masalahnya... apa melahirkan anak-anak yang cerdas yang sehat begitu.

Baik, selanjutnya Pak Sutrisno.

**F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

Pimpinan, izin. Pak Dirut apa Kepala Bapanas, Pak Dirut BUMN yang hadir. Pimpinan, izin, saya mewakili Fraksi PDI Perjuangan. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentunya menjawab persoalan rakyat yang kemarin petaninya ke sini, Bu, terkait masalah Petani Sangyang Sri. Petani Sangyang Sri itu menolak kebijakan atau tidak sepakat dengan kebijakan Sangyang Sri untuk merubah pola tanam dengan kerja sama menjadi swakelola itu. Alasannya... alasannya yang kemarin 300 hektar saja di swakelolakan petaninya rugi, petani rugi dan produksinya juga hanya 2 sampai 5 ton. Kemudian ini merubah prinsip dasar, Pak Kepala Bapanas, ya prinsip dasar rakyat yang dari waktu ke waktu 3 turunan mengelola lahan itu, Bapak merubah menjadi buruh. Kami juga tidak menyetujui itu, Pimpinan, ini bukan negara kolonial, sudah merdeka ini ya. Orang sudah mengelola lahan sekarang dirubah lahannya bisa disewakan kepada korporasi itu petaninya sudah jadi



buruh begitu ya. Jadi ada dua hal di sana yang Sangyang Sri ada swakelola, ada kerja sama.

Yang kerja sama juga keberatan minta kebijakan ya sewanya *tuh* 2,3 ton, Pak ya. Kalau hitung-hitungan berdasarkan Sangyang Sri bahwa apa namanya biaya operasional sudah Rp19.900.000,00 itu dikonversi ke gabah itu 4,2 ton. Sewa lahan 1 musim 4,2 ton ditambah... mohon maaf, apa biayanya sewanya 2,3 ton sudah 6,7. Sedang prediksi daripada Sangyang Sri hanya 6 ton. Rakyat harus menderita kerugian. Mohon Pak, saya sudah meninjau lahannya, sekarang lahannya terlantar. Tinggal pilih kalau dibiarkan itu akan terlantar karena rakyat akan melakukan perlawanan manakala Sangyang Sri memaksakan diri untuk tetap menggunakan swakelola apalagi itu apa namanya diserahkan kepada apa korporat kepada perusahaan. Jadi kesimpulannya kami tidak menyetujui. Ini bukan negara kolonial, ini negara merdeka jangan dirubah mereka mengolah lahan sekarang jadi buruh itu *loh*, Pimpinan.

Kemudian pada kebijakan-kebijakan Bapanas ya. Tadi sudah disinggung sama Demokrat ya bahwa sudah ada harga acuan beras Rp9.000,00 per kilo kemudian acuan gabah Rp4.600,00 per kilo itu ya, kemudian, kemudian mendorong, mendorong beras Bulog masuk ke pasar ritel.

#### **KETUA RAPAT:**

Pak Sutrisno hanya menjelaskan, meluruskan. Yang 89 tadi baru usulan belum disetujui, jadi jangan salah nanti ini kan *live* ya, ini waktu itu karena rapat bulan Desember Komisi IV meminta supaya ada pengusulan kenaikan HPP baru diusulkan belum diputuskan. Nanti kalau Pak Sutrisno pulang ke Dapil takut ditanyakan oleh rakyatnya kan *enggak* enak ya. Ya, lanjutkan Pak Sutrisno.

#### **F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):**

Baik.

Terima kasih, Pimpinan.

*Nah*, kami dari fraksi memang perlu penegasan ini karena bulan depan sudah mau panen ya. Kalau Anda tidak ada patokan ya kemudian ternyata terjadi penurunan lebih daripada itu turunnya ya, gejolak menghadapi situasi politik, itu juga akan membahayakan. Jadi mohon segera dipastikan berapa nanti apa patokan yang akan diberikan oleh pemerintah. Yang menjadi persoalan itu bahwa tadi seharusnya memang beras Bulog itu, itu kan masuk ke pasar ritel karena beras Bulog itu ada dua kepentingannya, cadangan beras pemerintah dan juga untuk mengendalikan harga itu. Nah, jadi ribut-ribut impor bukan cenderung cadangan beras pemerintah, tidak masuk ke pasar itu ya jadi tidak bisa masuk pasar karena *toh* tujuan membeli itu kan untuk penguatan cadangan beras pemerintah menurut informasinya itu. *Nah*, oleh karena itu dalam rangka mengendalikan harga, beras itu masuk-masuk ke retail agar supaya apa, tidak terjadi disposal. Disposal tidak akan terjadi harga akan apa

lebaran akan terus baru itu. *Nah*, pertanyaannya adalah mana kala ini jadi ditetapkan 4.600 ya ini pertanyaannya. Kemudian Bulog juga terbatas kan kemampuannya ya, kebutuhan beras itu kan 31 juta apa namanya ton. Bulog hanya 1,5 juta ya kemudian pasar juga tidak menyerap mengakibatkan harganya turun ke bawah. Pertanyaannya adalah penetapan harga itu sampai berapa jauh tanggung jawab Bapanas yang menetapkan harga itu, itu persoalannya. Itu juga tadi ditanyakan oleh Demokrat, menetapkan batasan harga tapi harga itu tidak bisa diamankan ini. Pada saat itu tidak dijangkau, bertanggungjawabkah pemerintah untuk menyerap gabah dengan harga itu itu.

Kemudian masih pada kebijakan Pak ke Pak Bapanas, tadi masalah inflasi. Inflasi bulan Januari disebabkan karena cabai sama bawang ya. Jadi sampai kapan pun dalam berita yang kami himpun, itu kan karena harga cabai sama harga bawang. Barang-barang itu kan tergantung pada musim. Di musim hujan pasti kan akan kurang apalagi pasarnya apa namanya hasil produksinya tidak bisa terserap oleh pasar secara keseluruhan. *Nah*, oleh karena itu solusinya adalah bisakah atau juga kami mendorong agar Bapanas meminta para pengusaha untuk membeli cabai kering dari produksi kita sendiri karena hasil cabai yang ditanam di musim hujan itu sebagian kenapa patek, yang sebagian kena patek tidak bisa masuk ke pasar. Mana kala ini di rubah menjadi cabai kering sehingga petani tidak akan mendapatkan kerugian itu jadi artinya apa, persoalan itu ada pada tidak adanya *off farm*. Dengan adanya Bapanas maka BUMN apa pangan ini agar bisa bertindak sebagai *off farm* untuk menanggulangi persoalan harga.

Kemudian terkait dengan *roadmap* Bapanas juga kegiatan program atau di tahun 2023. Dari realisasi tahun 2022, aktivitas Bapanas itu ada 4 poin: pemantapan ketersediaan stabilitas pasokan pangan. Tentunya ini kan berhubungan yang mengeksekusi itu adalah BUMN pangan begitu. Kemudian pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi ditambah lagi tiganya pemantapan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan. Pak, ini daerah otonomi daerah, kedua aktivitas itu, itu sudah dijalankan oleh pemerintah daerah otonom ini. *Nah*, oleh karena itu dalam konteks kita membikin *roadmap* apa namanya Bapanas tentunya harus diintegrasikan dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah otonom.

*Nah*, di dalam rencana tahun 2023 itu, kami tidak membaca apa yang diuraikan di situ. Target Bapak pemerintah membentuk Bapanas itu kan agar terwujud ketahanan pangan yang didasarkan pada kemandirian dan kedaulatan pangan itu artinya apa, kebutuhan pangan harus dipenuhi oleh produksi dalam negeri. *Nah*, yang akan membangun itu tentunya kan bukan Bapanas ini, kementerian lain oke sebut saja Kementerian Pertanian itu. Kemudian ada bagian-bagian lain yang tidak ditangani oleh kementerian yang lain. *Nah*, dalam hal ini tentunya di dalamnya tanggung jawab Bapanas, apa itu ya, pangan yang aneka ragam yang tidak dikelola oleh kementerian sebut saja umbi dan apa namanya tanam, di sini kan ada program panganekaragaman pangan. Itu memang betul tanggung jawab nanti dikembangkan oleh Bapanas ya.

*Nah*, di dalam konteks ini di dalam rencana tahun 2023, ada fasilitas distribusi pangan dan gerakan pangan murah. Ini kan mestinya kan yang melaksanakan BUMN pangan. *Nah*, pertanyaan saya adalah anggaran itu akan membeli sendiri atau memerintahkan kepada apa nama BUMN Pangan untuk melaksanakan. Di sisi lain, ada pembelian 70 unit, 70 unit kendaraan *nah* distribusi ini kan dilakukan oleh yang menyediakan pangan. Ini juga mohon penjelasan itu mau apakah memang Bapanas akan juga membeli kendaraan itu ya. *Nah*, kalau itu yang dilakukan

**KETUA RAPAT:**

Pak Sutrisno sudah 5 menit lebih. Boleh kasih yang lain saja?

**F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):**

Ini terakhir, Pak, saya ini masalah menyikapi ini ya. Ya, kalau memang sudah dihentikan, ya terima kasih Pak ya.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Sudah, Pak? Baik.

Terima kasih, Pak Sutrisno.

Pak Edward Tannur, silakan.

**F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):**

Baik.

Selamat sore untuk kita semua.

Yang saya hormati Pimpinan Sidang bersama teman-teman Anggota Komisi IV,  
Dari Bapanas, dari Direktur Bulog dan dari ID Food terima kasih banyak beserta jajarannya.

Jadi mencermati apa yang tadi sudah dipaparkan dan sementara ada tanggapan dari teman-teman, saya juga ikut menanggapi juga ambil kesempatan juga untuk menanggapi. Sesungguhnya perencanaan yang dipaparkan ini saya memberikan apresiasi, bagus ini perencanaan cuma ini ada hubungan erat dengan kementerian-kementerian yang memproduksi. Kalau lagi produksi enggak ada biar kita rencana sampai mau ke bulan juga percuma ini. Jadi produksi dan anggaran, jadi memang ini dilematis maka itu diperlukan koordinasi yang mantap. Kalau tidak ada koordinasi masing-masing jalan sendiri atau koordinasinya belum cukup, pasti mengalami hambatan-hambatan dalam merealisasikan kinerja-kinerja yang kita galang ini. Kita semua tahu kalau produksi *enggak* ada, apanya yang mau diomong.

Tadi kan sudah dibilang ternyata kita ini defisit, 6 bulan sudah defisit pangan khususnya beras. Maka itu dilakukan impor tapi data ini kan simpang siur, si A bilang surplus ya bilang si B bilang kurang. Ini mau dengar yang mana ini sebenarnya. Data yang benar ini mungkin hanya Tuhan Allah punya saja. Ini saya juga dengar tiap kali kita rapat-rapat, saya bilang kenapa kita tidak bisa memiliki satu data yang akurat. Ini Bapanas juga mau menentukan kebijakan saya tidak yakin itu harga patokannya itu harga beras itu Rp8.900,00 tidak mungkin karena ini merangkak naik terus sudah 10... 10.000 lebih. Mudah-mudahan nanti panen pada musim tanam pertama ya ini bisa menekan karena stok nasionalnya akan banyak nanti. Mudah-mudahan saja kita banyak berdoa saja.

Jadi Bapanas yang bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 untuk menjaga kedaulatan pangan, kemandirian pangan, ketahanan pangan dan terbentuknya Badan Pangan Nasional yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Kita tetap memberikan apresiasi karena kita bagi-bagi peran. Kalau perannya di satu orang, nanti tidak ada yang melakukan kontrol atau tidak melakukan koreksi nanti seenaknya dia ngomong sesuka dia. Jadi itu yang membuat kita sekarang terjebak. Jadi mungkin saya hanya menyampaikan singkat-singkat saja.

Jadi tolong Bapanas secara teori Bapanas harus bisa mengalkulasi kebutuhan yang real atau gambaran dulu gambaran-gambaran tentang kebutuhan pangan secara nasional. Dari situ kita bisa ada bayangan ya meleset pasti ada tapi mungkin menjadi acuan kita untuk tahun-tahun berikutnya. Ya, namanya orang memprediksikan boleh *dong* tidak ada salah, harus berani bisa memprediksi, salah ya memang anomali iklim dan bencana alam lain-lain kita jujur kita sampaikan. Jadi tidak ada hal yang tabu bagi kita dalam melakukan tugas-tugas kita di bidang pemerintahan ini.

Yang berikut, yang berikutnya mengenai impor. Saya kira untuk saat sekarang, impor ini saya kira pas kok daripada ternyata kan defisit. Defisit ini apa produksi pangan khususnya beras kita. Kalau kita tidak mauantisipasi nanti sudah kejadian siapa yang mau disalahkan. Kalau orang enggak punya uang mungkin bisa bertahan tapi enggak punya makan mati dia. Kalau enggak punya uang ya *enggak* usah keluar-keluar *toh* di rumah saja yang penting ada ada rumah, ada pakaian, ada semua sudah tenang tapi *enggak* punya makan ya celaka.

Intinya kebijakan impor ya hendaknya diperhatikan. Kalau nanti pada musim panen itu, saya kira harus diperhitungkan secara baik agar petani tidak dirugikan karena mereka sangat berharap kebijakan pemerintah ini bisa membawa kesejahteraan bagi mereka seperti perhitungan tadi, Pak Ketua bilang pupuk naik, bahan bakar naik, semua naik, yang turun mungkin... Jadi salah satu lagi impor tepung telur. Saya baru dengar hari ini impor tepung telur itu. Itu luar biasa itu waduh itu sangat merugikan peternak kalau kita melakukan impor tepung telur. Cobalah kita berdayakan petani-petani kita, kasihan *dong* harga pakan sudah naik, harga semuanya naik, harga telurnya malah turun ini kan repot ini nanti. Jadi ini juga menjadi satu perhatian bagi kita semua. Dan salah satu strategi yang tadi saya catat Pak Buas eh Pak Bapanas katakan

daerah surplus menyuplai ke daerah defisit. Itu strategi yang bagus cuma datanya harus akurat. Jangan sampai kita salah menyuplai sampai sana barangnya malah jadi rusak atau karena *over*. Jadi itu saya sangat mendukung teknik atau cara....

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Masih banyak Pak Edward?

**F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):**

Ya ini satu lagi Bu, sudah lama libur jadi ini ngomong tambah sedikit lagi...

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Silakan.

**F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):**

Supaya pemikiran itu bisa. Jadi baik sudah jadi saya juga harus supportif karena teman-teman tadi sudah apa dikurangi juga dia karena bicara terlalu lama. Saya kira prinsipnya hanya itu Bapanas harus melakukan kontrol yang baik dan penetapan harga, harga ini apa pembelian pemerintah itu harus betul-betul melalui evaluasi yang baik sehingga tidak merugikan semua pihak atau di salah satu pihak. Semua bisa *win-win solution*.

Itu saja intinya itu yang saya perlu sampaikan.

Terima kasih banyak.

Selamat sore untuk kita semua.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Terima kasih, Pak Edward.

Selanjutnya Pak Slamet. Ini PDIP kok jejer-jejer ini sudah siap-siap untuk terbuka.

**F-PKS (drh. H. SLAMET):**

Saya di tengah PDIP dan Golkar, Bu. Makanya saya jadi penengahnya ini Golkar sama PDI.

Baik.

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Terima kasih Pimpinan yang saya hormati,  
Rekan-rekan Anggota yang saya hormati,  
Pak Kepala Badan, saya hormati.

Saya ucapkan selamat mudah-mudahan doa saya umrohnya menjadi umroh yang mabrur. Aamiin.

Jadi saya kalau ketemu Pak Arief jadi ingat *roadmap* saja begitu. Jadi yang 10 hari jadi akhirnya setahun, kan kemarin kita bahas di 2022 ya. Terkait dengan *roadmap*, bayangan saya juga sama tadi seperti disampaikan oleh Pak Suhardi bahwa Bapanas ini didesain dalam undang-undang inginnya hadir sebagai antitesa dari para mafia itu yang dengan semangat disampaikan oleh Pak Buas begitu ya dan itu sudah saya sampaikan ketika itu bahwa sudah impor tapi *kok* mahal ada apa ya.

*Nah*, saya dengan harapan yang sangat besar bahwa ini menjadi antitesa paling tidak mengimbangilah sehingga monopoli-monopoli akan kalau hilang harusnya itu negara bisa menghadirkan itu. *Nah*, cuma setelah kemudian saya baca *roadmap* diturunkan lagi ke dalam program, rasa-rasanya *kok* tidak terlalu nyambung, ini versi saya ya nanti kita diskusikan lagi karena tugas yang besar itu, saya melihat dengan penyederhanaan dan lain-lain kepada 10 ini, ini lebih kepada apa pemadam kebakaran untuk mengatasi inflasi, Pak, bukan jauh kita bicara tentang kemandirian pangan apalagi bicara tentang kedaulatan. Kalau apa terkait dengan ketahanan pangan okelah karena bisa undang-undang kita sudah dibuka bicara tentang ketahanan pangan, silakan impor kan begitu, tidak ada larangan lagi tetapi ketika kemudian kita buka di sini hanya kemudian saya membaca *roadmap* ini, badan ini desain paling utama untuk menjadi pemadam kebakaran bagaimana mengatasi inflasi. Mohon nanti dijelaskan kalau pandangan saya kurang pas, kita mungkin bisa diskusikan lebih jauh lagi karena saya melihat itu termasuk program-program di belakangnya, Pak ya. Program-program turunan di belakangnya tidak mencerminkan apa yang kita bayangkan.

Bicara tentang kemandirian dan kedaulatan pangan tidak terlepas dari bagaimana kemudian mengangkat kesejahteraan dari para petani itu, ini ya. Ketika kemudian programnya ratusan miliar hampir saya jumlah, kalau salah dikoreksi, hanya untuk kemudian koordinasi, penyusunan prognosa, registrasi, menyusun neraca pangan kemudian juga pengembangan aplikasi, penyusunan norma. Mana kaitannya dengan kemudian kita menuju kedaulatan pangan dan kemandirian pangan dari kita, masih jauh, Pak ya. Artinya bisa jadi *roadmap* ini bagus tapi diprogram harus kemudian dikawal, Pak Kepala ya agar kemudian menyambung dengan ide dasar dari itu sehingga saya lebih kepada bukan menjadi antitesa para mafia Pak Suhardi, lebih motif ekonomi lebih lebih dikedepankan tadi untuk mengatasi dari inflasi itu. Ini catatan saya terkait dengan *roadmap* termasuk yang tadi di dulu pernah saya sampaikan juga ini kan luar biasa tadi di awal juga disampaikan oleh Pak Kepala Badan

bahwa ini menjadi pimpinan orkestra yang akan indah ketika kemudian pimpinannya ini.

*Nah*, sudah 2022 di *roadmap* ini paling akhir adalah penyusunan *blueprint* dan penguatan kerja sama lintas K/L. Ini yang memang menjadi kunci tadi disampaikan Pak Suhardi karena sekarang sudah tahun 2023, saya ingin tahu wujud dari *roadmap* ini. Nanti bisa dipaparkan bagaimana kemudian penyusunan *blueprint* dari apa penguatan kerja sama lintas K/L karena memang masalah utama kita hari ini kan di situ, Pak. Kalau Pak Arief ini konsepnya luar biasa, mudah-mudahan akan tercatat menjadi Kepala Badan Pangan pertama yang sukses untuk kemudian membawa Indonesia menuju kemandirian dan apa kedaulatan pangan. Ini titik tekan kita adalah di situ sehingga saya juga ingin mencari eh mendapatkan gambaran bagaimana nanti program Pak Arief dalam rangka kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan petani.

Masalah kita hari ini diproduksi itu bukan masalah petani yang tidak mau menanam, Pak, *enggak* tetapi dia tidak mau menanam karena memang tidak yakin dia bisa laku dan profesi petani ini sering kita sampaikan begitu. Profesi yang tidak membanggakan dan diprediksi akan hilang karena apa tidak ada jaminan, Pak. Ketika kami ketemu dengan para konstituen kita, bapak-bapak petani siapa yang mau mewariskan pekerjaan bapak kepada anaknya, *enggak* ada yang angkat tangan, Pak. *Nah*, ini kita saya khususnya berharap kepada Bapak bagaimana kemudian mendesain ini sehingga program nasional, produksi nasional bisa tergenjot karena juga atas ini karena ya ujung-ujungnya pengendalian harga kalau menurut dari Perpres ini kan ada di Bapak begitu ya sehingga ini belum muncul di *roadmap* menurut saya sehingga ini kemudian perlu dimunculkan. Itu terkait dengan badan pangan kita dalam lagi terkait dengan *roadmap*.

Saya masuk ke ID Food ini. Ya, terkait pertama tentang Program Makmur. Saya pernah minta di mana titiknya? produksinya berapa? hasilnya seberapa begitu? Kalau *enggak* salah sudah agak lama. Terus kemudian juga apa koordinasi dengan Kementan seperti apa? petani yang mana yang diambil? apakah ini memang siap produksi atau demplot saja. Saya ingin mendapatkan gambaran seberapa jauh kontribusi terhadap produksi nasional? karena kalau ini kan sering ditampilkan sekian ribu petani, sekian ribu hektar kita ingin mendapatkan titiknya sekaligus juga hasil produksinya dari Program Makmur ini. Kalau Program Makmur ini CSR ya kalau *enggak* salah kan CSR *tuh*, bukan, oke, nanti kita ingin mendapatkan gambaran sejauh mana *support* atau kemudian kontribusi terhadap produk nasional dan yang terakhir saya menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua tadi. Jadi karena memang kami juga mendengar Pak, Pak Arief juga bahwa BUMN-BUMN ini tidak lebih dari broker untuk kemudian menjual kuota tapi tadi dijawab oleh Pak Direktur bahwa itu salah, Pak. Buktikan bahwa isu yang ada di luar itu salah. Saya ingin tanya berapa Bapak kuotanya GPS? kemudian berapa jadi PS? sewa kandangnya di mana berikan data kepada kami.

Pak Ketua, Bu Pimpinan saya usul, Kunspek kita cek ya berapa kuota GPS yang diberikan oleh kepada ID Food. Kemudian nanti kita akan cek di

kandang PS-nya dan kemudian kandang *parent stok*-nya sehingga nanti kita betul bahwa oh betul ini tidak jualan kuota tetapi diproduksi sendiri dalam rangka kemudian itu, karena apa? kalau ini dilakukan juga hanya jual kuota maka saya lebih apa lebih *strick* bahwa ini tidak menjadi antitesa bagi mafia bahkan menjadi bagian dari mafia.

Demikian mungkin.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

*Walaikumsalam.*

Terima kasih, Pak Slamet.

Pak Haerudin, oh *enggak* ada, oh lagi rapat ya, baik.

Ibu Yessy, silakan.

**F-P. NASDEM (YESSY MELANIA, S.E.):**

Oke, baik.

Terima kasih, Ibu Ketua.

Pak Ketua dan rekan-rekan Komisi IV yang saya hormati, dan Mitra, ada Pak Buas, Pak Arief dan Pak Frans, beserta jajaran

Beberapa hal yang mungkin akan saya sampaikan meskipun tadi sudah secara gamblang disampaikan oleh rekan-rekan yang lain dari fraksi yang lain.

Yang pertama, saya akan menyoroti terkait anggaran dari BPN ini yang saya pikir cukup signifikan turunnya dari 2021 ada 400 miliar. Sekarang di posisi 100 lebih jadi begitu minim dan di bahan tadi dipaparkan bahwa BPN juga meminta penguatan dari kita di *support* untuk di kiranya bisa ditingkatkan dan kami dari Fraksi Partai Nasdem juga setuju untuk ini ditingkatkan. Ya, tentu dengan beberapa catatan-catatan yang akan kami sampaikan. Yang pertama, boleh lanjut, Ibu. Oh soalnya bunyi, sholat *enggak* apa-apa. Jadi tadi yang pertama terkait data. Sekali lagi kita semua di sini menginginkan bergerak merumuskan kebijakan mengambil keputusan itu *by data* yang betul-betul bisa akurat.

*Nah*, kalau tadi saya lihat di sini kan peran dari Badan Pangan Nasional ini memang memainkan data. Ini tidak bisa kita pungkiri. Kita harus mencari data *supply, demand* kemudian defisit dan surplus daerah pangan kita, rawan pangan, bicara *stunting* dan lain sebagainya, harga yang harus dipastikan



terjamin di tingkat petani itu juga menjadi kebijakan dari BPN dan ini tentu semua itu kami harapkan bisa betul-betul *clear* begitu di... di tingkat bawah dan sampai ke petani merasa bahwa mereka juga diperhatikan oleh pemerintah karena dalam hal ini kalau kita bicara sektor keamanannya juga selama ini ricuh-riuh yang terjadi di sektor pangan juga tidak terlepas dari harga yang begitu rentangnya jauh begitu dimainkan ya mungkin dengan banyaknya tengkulak atau rantai pasar yang dilalui.

Kemudian catatan karena tadi teman-teman juga banyak menyinggung masalah *stunting*. *Stunting* ini menjadi isu yang saat ini luar biasa dan kita menginginkan dari Badan Pangan Nasional ini tidak hanya berbicara di kulit karena kita tahu sudah begitu banyak kementerian/lembaga lain yang juga *concern* terhadap *stunting* dan pangan, harapan kita tentu harus menjadi garda terdepan bisa lebih menggigit begitu. Dipastikan kepada Komisi IV dan masyarakat Indonesia apa yang akan dilakukan karena kalau hanya sekedar mungkin bagi bagi-bagi sembako gitu ataupun bagi-bagi ya semacam kue atau susu atau apalah untuk balita atau ibu hamil, itu kebanyakan sudah banyak begitu dilakukan oleh kementerian/lembaga lain.

Kami menginginkan hal yang berbeda dari Badan Pangan Nasional dan juga nanti harus berdasarkan data yang betul-betul *real* di lapangan karena kalau melihat contoh misalnya kayak di perbedaan Jawa dan di luar Jawa. Kalau di luar Jawa bisa dipastikan angka *stunting*-nya itu benar-benar cukup tinggi dan mengkhawatirkan. Misalnya Kalimantan atau daerah NTT tadi Pak Ansi juga menyoroti itu dan di sana tentu juga kompleksitasnya luar biasa. Kita mau melakukan jalur logistik untuk pembagian distribusi pangan dan lain sebagainya, bicara lagi kondisi jalannya seperti apa. Kemudian armadanya kita menggunakan apa, itu juga menjadi catatan. Jangan sampai barang ini yang cepat busuk misalnya sampai ke sana sudah tidak berfungsi lagi. Itu catatan dari kami pak untuk program-program yang akan dilakukan di 2023 ini.

Kemudian terkait impor, tadi juga sudah disampaikan beberapa teman yang lain mengingat 500.000 impor kita dan diperkirakan sampai 500... 500.000 ton, betul, Pak Ketua, 500.000 ton dan separuhnya sudah masuk dan kemungkinan hampir akan mendekati Februari akhir begitu, baru masuk semua gitu. Dan diperkirakan data dari Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian bahwa Februari akhir atau Maret itu sudah mulai panen raya dan kami juga minta penegasan di sini, jangan sampai siklus ini mengganggu harga gabah ataupun beras di tingkat petani. Itu harus dipastikan betul, jangan sampai nanti ada keributan lagi terkait hal ini.

Kemudian yang ketiga, kami juga memandang perlu ada penyesuaian terkait HPP/Harga Pembelian Pemerintah karena kita juga melihat fluktuasi di lapangan juga luar biasa. Kenaikan BBM, kemudian kenaikan pupuk, intinya untuk produksinya untuk hilirisasinya ini *cost*-nya cukup tinggi jadi banyak juga dikeluhkan oleh para petani misalnya jagung. *Nah*, ini juga perlu ada evaluasi berkala kami pikir untuk HPP ini.

Kemudian itu memang yang sangat krusial saya pikir yang harus disampaikan dan kembali lagi kesimpulan akhirnya kita harus berbicara dan

bergerak berdasarkan data karena kalau data sudah pasti betul tentu kebijakan dan keputusan yang akan kita hasilkan juga akan betul dan relevan di lapangan.

Itu saja, Pak Ketua.

Terima kasih.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Baik.

Terima kasih.

Ibu Saadiah.

**F-PKS (SAADIAH ULUPUTTY, S.T.):**

Terima kasih, Bu Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Ini minum dulu ya, sudah, Pak.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang saya hormati,  
Pak Frans, Pak Buas, Pak Arief beserta jajaran yang saya hormati.

Ini sebenarnya kehadiran Bapanas ini satu harapan ya, harapan kita semua dalam rangka menjawab berbagai keruwetan dan kerumitan untuk mengatur sistem apa namanya pangan yang kalau dari Perpres Nomor 18 itu dia mengaturnya dari hulu sampai di hilir ya, Pak, dari ya dari bicara tentang kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan. Kalau yang dalam apa yang disampaikan begitu. Dalam konteks kedaulatan pangan, Pak, ya itu kita berharap bahwa Indonesia ini sebagai negara agraris kita sepenuhnya memosisikan atau apa namanya ada satu target besar agar bicara tentang kedaulatan pangan itu adalah bicara tentang bagaimana dari sektor produksi sampai kepada konsumsi itu *tuh* bisa diatur di dalam negeri, Pak, artinya sudah tidak lagi tergantung dari luar ataupun ketersediaan yang bisa kita ambil dari luar, Pak, karena kita sudah bicara tentang bagaimana ketahanan pangan kita begitu.

*Nah*, oleh karena itu sebenarnya hal yang paling penting juga adalah koordinasi antar *leading* sektor yang paling utama dalam hal ini juga adalah Kementerian Pertanian begitu. *Nah*, dan salah... sudah beberapa kali kita RDP ataupun Raker dengan di... di bersama... Raker bersama itu ya ada semacam belum duduknya satu apa namanya pemahaman begitu yang sama antara Kementerian Pertanian kemudian juga Bulog dan Bapanas. *Nah*, harapannya adalah Bapanas ini nih bisa menjadi semacam ya apa namanya titik utama ya lah episentrum lah ya begitu untuk bisa mengatur, Pak. *Nah*, saya sebenarnya

ketika hari ini kita di lapangan ada harga yang tinggi, Pak. *Nah*, kalau dalam apa namanya sistem ataupun sistem pasar itu, harga tinggi karena produksi-produksi yang kurang begitu. *Nah*, harusnya ketika misalnya bicara produksi berarti bahwa kita bicara di dalam negeri dan juga cadangan yang ada yang di yang dalam hal ini fungsinya ada di Bulog begitu.

*Nah*, maka saya menyoal soal kalau misalnya ada satu program ataupun strategi pemerintah dalam menjawab bagaimana tentang kedaulatan pangan kita yang dari tahun ke tahun belum menuju ke swasembada pangan maka salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah juga adalah *food estate*, Pak. *Nah*, *food estate* ini, ini adalah bagian daripada upaya-upaya untuk melahirkan salah satu lumbung pangan menjawab tentang kekurangan pangan. Maka saya minta kepada Bapanas untuk bisa menyajikan kepada kami di sini berapa sih produksi yang sudah di apa namanya meskipun ini mungkin juga ranahnya Kementerian Pertanian begitu tetapi dalam satu data ini yang dalam *roadmap* ini, ini sebenarnya integrasinya itu tuh ada juga di Bapanas begitu sehingga kami juga minta data yang bisa tersaji, Pak yang sudah di beberapa kawan beberapa provinsi ya 4 provinsi, kemudian ada tambahan lagi begitu sehingga hari ini kalau bicara impor harusnya tidak impor. Kita sudah ada pada satu kedaulatan pangan, Pak.

*Nah*, dan oleh karena itu sebenarnya masyarakat sebenarnya kalau misalnya bicara tentang harga yang tinggi, petani kita senang begitu Pak harganya tinggi tapi apakah hari ini memang harganya tinggi itu di petani ataukah di pasar pak. Yang kedua, biasanya untuk operasi pasar petani selalu mengeluh, pemerintah ini *kok* aneh ya giliran harganya tinggi selalu ada operasi pasar tapi kalau harganya jatuh *kok* tidak ada satu upaya atau regulasi yang diatur agar bagaimana juga agar masyarakat ataupun petani bisa dilindungi dari turunnya ataupun anjloknya harga.

Itu saja Ibu Ketua dari saya.

Terima kasih.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Baik.

Terima kasih, Bu Saadiah.

Kalau harga tinggi petaninya jadi lebih makmur *sih* senang banget juga ya tapi apakah iya. Bisa jawab *enggak* nanti Pak Arief kira-kira.

Ibu Teti silakan.

**F-PG (TETI ROHATININGSIH, S.Sos.):**

Terima kasih, Bu Ketua.

Bu Ketua dan segenap Anggota yang saya hormati,  
Mitra kerja pada sore hari ini yang berbahagia,

Saya hanya satu, Pak di sini tadi Bapak sudah memaparkan bahwa untuk pencegahan stunting kita dialihkan ke sasarannya anak sekolah. Padahal, di sini juga ada peduli gizi anak juga anak sekolah yang anggarannya 68,9 miliar ini juga 46, mekanismenya seperti apa, Pak. Jangan sampai tumpang tindih karena memang di seluruh kementerian juga untuk pencegahan *stunting* semuanya ada bahwa di Setneg pun ada, di pemerintahan provinsi kabupaten kota semua ada. Bahkan, di desa pun dan memerlukan dana desa itu juga ada. *Nah*, jangan sampai tumpang tindih dalam pemberiannya. Sasarannya siapa harus jelas Pak ke depan supaya semua masyarakat kita yang memang harus dientaskan atau diminimaliskan angka *stunting*nya terkena sasaran dari anggaran tadi Bapanas.

Itu Bu Ketua.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Terima kasih, Ibu Teti.

Pak Made Urip.

**F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si):**

Terima kasih, Ibu Ketua.

Pak Ketua Komisi IV yang saya hormati, dan Mitra kerja dari Badan Usaha Milik Negara Direksi Direktur Bapanas, kemudian Dirut Perum Bulog dan juga dari Dirut ID Food.

Saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pangan. Jadi Bapanas ini lahir karena amanat dari Undang-Undang Pangan tentang Kelembagaan. Di sana diamanatkan itu harus membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani tentang pangan dan sekarang sudah terealisasi. Jadi umurnya masih relatif pendek. *Nah*, saya tertarik dengan nomenklatur dari Bapanas tadi, di sana ada salah satu yang menangani masalah diversifikasi yaitu dikti yang menangani masalah diversifikasi. *Nah*, ini yang selama ini yang belum mendapatkan perhatian yang begitu serius dari pemerintah karena dulu ada desain dari pemerintah ya orde baru dulu itu yaitu tentang beras supaya serentak di seluruh Indonesia ini diberikan beras. Padahal, kalau kita melihat sumber daya alam kita ini sangat beraneka ragam. Satu daerah itu punya pangan lokal yang harus kita hidupkan kembali. Jadi orang NTT ya biasa makan jagung, orang Papua biasa makan sagu, demikian juga yang Maluku dan saya di Bali biasa makan singkong umpamanya begitu.

Nah, barangkali ini yang perlu mendapatkan perhatian dari Bapanas untuk menjaga mewujudkan kedaulatan pangan ini itu. Jangan dikit-dikit berbicara tentang impor begitu ini. *Nah*, sekarang saya ingin tanya di dalam *roadmap* Bapak ini secara realistis kemudian juga aplikatifnya ini belum menunjukkan ada aktivitas yang konkret program konkret untuk menangani persoalan tentang diversifikasi pangan ini, itu. Kita kaya umbi-umbian ini itu sebagai pengganti beras bisa sebetulnya. Jangan sebentar-sebentar diubah, digiring itu orang NTT untuk ya sepenuhnya makan beras begitu nasi jadi hidupkan kembali itu jagung, hidupkan kembali itu sagu itu. Itu salah satu alternatif yang memang untuk menjaga kedaulatan pangan kita itu. Jadi itu dimasukkan dari saya, Pak.

Kemudian untuk menjaga kedaulatan pangan kita ini yang kedua harus ada pendekatan kultural juga, Pak. Pendekatan kultural itu apa ya di daerah-daerah itu banyak ada lumbung pangan ya yang setiap saat hasil panennya itu disimpan di sana. *Nah*, ini barangkali sekarang sudah mulai memudar. Ini perlu lagi dihidupkan, Pak. Ketika musim paceklik ini ya pangan yang disimpan ini diambil itu. Persis saya di Bali itu ada namanya jineng namanya, Pak, itu dipakai untuk menyimpan beras, menyimpan padi itu. *Nah*, di sana ketika musim paceklik ya ambil sama dia. Betapa apa visionernya orang-orang tua kita dulu menjaga ketahanan pangan kita ini, itu. Jadi aktivitas program-program yang aplikatif ini perlu dipikirkan, Pak oleh terutama oleh Bappenas, Bapanas ini yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menjaga stabilitas pangan kita ini begitu. *Nah*, selanjutnya usulan anggaran yang disampaikan melalui oleh Pak Dirut Bapanas 1,4 triliun, 1,6 triliun...

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Kepala Bapanas.

**F-PDIP (Drs. I MADE URIP, M.Si):**

Ya, Kepala Bapanas. Ini usulan anggaran itu, ini kan barangkali terlalu tinggi, Pak. Bapak tunjukkan dulu progres kinerja Bapak itu. Jadi kalau bagus kinerja bapak pasti Komisi IV DPR akan meng-endorse anggaran bapak ini begitu, belum apa-apa sudah mengusulkan 1,4 ini. *Nah*, ini itu barang kali ini perlu ditunjukkan dulu pak aktivitas Bapak yang konkret di lapangan. Tentu kerja sama dengan teman-teman di Perum Bulog dan mungkin juga dari ID Food itu.

*Nah*, selanjutnya saya ingin juga menyampaikan kepada Pak Dirut Perum Bulog ya. Jadi kalau untuk Bulog ini kan tidak sama dengan dulu, dulu kan LPMD/Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden kemudian mendapatkan anggaran dari APBN itu, di *support* betul sehingga bapak bisa membeli gabah sekarang kan tidak. Namanya Perum punya amanat di dalam apa Peraturan Pemerintah itu tentang Perum ini yaitu fungsi publik dan fungsi bisnisnya. *Nah*, saya ingin bertanya tentang fungsi bisnis ini komersial Bapak ini, jalan *enggak* ini. Saya lihat di lapangan ya agak *megap-megap* ini itu karena sirkulasi beras Bapak ini tidak

jalan begitu. Dulu ada Raskin namanya sehingga Bapak kalau ditugaskan untuk membeli gabah petani kita, hasil panen kita jelas tidak akan bisa maksimal, paling-paling saja maksimal itu 7% begitu. Jadi kalau dulu kan beda di *support* lewat BLBI dulu kan oleh APBN, sekarang tidak. Saya paham itu betapa susahnyanya sekarang ini Perum Bulog ini menangani tentang persoalan pangan ini, itu.

*Nah*, yang terakhir Pak Kepala Bapanas ya. Tadi kan Bapak menangani komoditas 9, sekarang permintaan Bapak itu lagi menambah itu termasuk juga ikan. Menyelesaikan persoalan satu saja Pajale kedelai ini, ini belum beres-beres, Pak, belum beres-beres ini. Kenapa? karena produksi kita tidak mencukupi untuk kebutuhan di dalam negeri ini. Kebutuhan kita 2,3 juta ton produksi kita berapa sekarang? maksimal itu 700.000 ton per tahunnya itu pun dengan susah payah. Betapa sulitnya mendorong para petani kita untuk menanam kedelai karena tidak menjanjikan, Pak, tidak menjanjikan itu. Makanya kalau bisa Bapak harus intens bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk mendorong meningkatkan produksi kita di dalam negeri ini. Jangan mengharapkan importasi terus-menerus itu, kalau kita ingin betul-betul berdaulat di bidang pangan ini begitu.

Jadi begitu barangkali, Ibu Pimpinan dan terakhir salam Pancasila.

Merdeka!

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Terbuka apa tertutup.

Terima kasih Pak Made Urip.

Kalau di tempat saya di Jawa itu namanya grobog, sekarang *enggak* ada tapi sudah. Dulu saya masih menangi ya, Pak ya sudah masih mengalami Ibu saya punya grobog apa namanya itu dari kayu kan, kayak kotak begitu kayak peti matinya raja-raja Mesir tapi isinya beras.

Terakhir, Ibu Riezky Aprilia kandidat Doktor.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Wah, Aamiin Yaa Allah diaminin dulu karena itu yang susah banget, Ibu Ketua yang juga sama sebentar lagi kandidat bahkan sudah lebih dulu kayaknya Doktor Bu Ketua.

Saya sih saya *sih* cuma begini. Kalau saya pertama, saya mohon maaf harus menyampaikan anggaran yang tadi Bapak bilang satu koma sekian T itu dengan *roadmap-roadmap* yang normatif kayak begini seperti yang tadi senior saya sampaikan sudahlah kerja dulu saja, lebih baik *enggak* usah dulu ya. Saya... kenapa saya sampaikan, ini bukan hanya bukan hanya di lembaga bapak, NSPK layanan dokumen dan apa ini saya lihat angkanya begitu ya.

Sedangkan terakhir waktu kita rapat terakhir Bapak bilang oh ya kami juga *enggak* ada di bawah itu sifatnya koordinasi lah begitu loh ya tidak ini. Jadi dalam situasi hari ini Bapak bukan lembaga teknis. Sekali lagi saya ingatkan Badan Pangan Nasional bukan lembaga teknis, Bapak/Ibu sekalian tapi lebih ke regulator. *Nah*, tolong terminologi regulator ini jangan salah tafsir. Yang pernah saya sampaikan bahwa Badan Pangan Nasional itu berdasarkan Pasal 28, 29 itu dan seterusnya itu adalah pengatur *traffic* yang tadi Pak Suhardi mungkin sampaikan *supply demand*. Oke, jadi saya bukan mau mengkuliahi mungkin Pak Arief lebih cerdas lah tapi ini otak gobloknya saya saja yang mikir begitu yang namanya Badan Pangan Nasional, badan pangan mengatur kalau saya baca pasalnya kan 28 penetapan kebijakan. Penetapan kebijakan stabilisasi harga dan distribusi pangan menjadi turunannya hal, itu maksudnya yang kita harapkan di *roadmap* itu.

*Nah*, tadi disampaikan juga oleh Pak Slamet ya bagaimana waktu itu juga kita sampaikan bahwa ekspektasi kita *roadmap* itu bagaimana anda mengatur Kementerian Pertanian sebagai hulunya, Kementerian Perdagangan industri dan lain-lain ini yang sebenarnya ini *part of your duty* supaya ini karena mohon maaf Pak, saya juga melihat mencoba mencermati foto-foto Bapak. *Come on, you just do your policy*, begitu loh maksudnya. *Policies*-nya Anda ini ditunggu oleh para petani bagaimana ini ber-*impact*. Bicara berdaulat pangan ini apa? karena kan seingat saya, pemerintah pernah menggaungkan dari desa untuk Indonesia, mana?

Tadi Pak Made Urip, Ibu Ketua bahkan sudah ngomong. Jadi buat saya *roadmap* ini juga belum menjawab karena ini normatif, Pak, ya normatif. *Nah*, penyusunan *blueprint* dan mohon ini loh maksudnya lintas K/L ini karena Anda bertanggung jawab kepada Presiden. Apakah mungkin nanti Bapak menjadi badan yang ada undang-undangnya, sangat mungkin sekali tapi itu dia. Selama Bapak tidak bisa mem-*provide* apa yang dikerjakan, tadi mungkin kayak Pak Made menanyakan eh Bulog bagaimana Pak Buas, *kok* beda sama dulu. Bapak bisa menguatkan Bulog *strong point*-nya di mana itu kan terobosan atau ID Food itu ya kan.

Jadi maksudnya ekspektasi kita itu sebenarnya ada di halaman 11 di *fix fundamental 2022* paling bawah, *that's the roadmap* yang harus dikerjakan oleh Anda, Pak Arief, begitu loh. Jangan kasih kita, mohon maaf ya ini normatif karena Anda bukan teknis dan Anda bilang ada kemitraan, *ntar* dulu *deh enggak* akan selesai dengan program kemitraan begitu-begitu. Sama saja, kita ditodong di bawah seperti apa teknisnya, mungkin saya yakin juknisnya juga pasti pada bingung kalau kita gedor, kan begitu Ibu Ketua. Mungkin maksudnya, tujuannya baik tapi saya ingatkan sekali lagi, Badan Pangan Nasional bukan teknis. Anda itu kebijakan yang harus men-*support* program Bapak Presiden bicara daulat pangan itu dulu. *Nah*, turunannya saya mohon maaf karena saya juga dari tadi ketawa-ketiwi itu, saya *enggak* tertarik baca ini karena normatif dan kita sudah capek bicara normatif di sini begitu loh dan itu fungsi pengawasan kita di sini.

Mungkin itu saja Ibu Ketua, saya ingatkan mungkin untuk penambahan anggaran nanti dulu lah, kerja saja dulu begitu nanti sudah dikasih juga pertanggung jawabannya juga ribet.

Terima kasih, Pimpinan.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Baik, terima kasih Ibu Kiki.

Bapak/Ibu sekalian,  
Para mitra...

**F-PD (HJ. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):**

Boleh menyampaikan, masih boleh?

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Oh ya ya Pak Sunarna dulu kali ya, Pak Sunarna dulu saya lupa ya. Mohon maaf, Pak Sunarna karena ini susulan. Silakan Pak Sunarna. Kalau menyusul itu kadang-kadang terlupakan memang.

**F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):**

Terima kasih, Bu Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Dan teman-teman Anggota semua yang saya hormati,  
Pak Direktur juga Pak Kepala Badan, Pak Direktur ID Food.

Ini, Pak, mungkin saya sudah mendengarkan tadi tapi bahwa saya sepakat dengan Bu Kiki bahwa kepala badan ini adalah terkait regulasi, Pak. Saya tidak bis... dari tadi saya tidak melihat bahwa regulasinya seperti apa begitu. Kalau kita bicara pangan bagaimana regulasi yang akan diambil begitu, kalau kita bicara beras, gabah, harga gabah sekarang baguslah petani menikmati Pak dengan gabah 6.000, apakah itu perlu diintervensi untuk ke bawah, Pak, turun harganya, Pak. Kalau Bapak intervensi itu gencet petani, Pak, benar itu ngenain inflasi, Pak, naikan inflasi, Pak, tapi kalau inflasi itu berimbas pada kesejahteraan petani, kenapa tidak diikuti, Pak. Kenapa pemerintah, Bapak juga bisa menyampaikan bahwa inflasi bisa ditekan dari tempat lain begitu.

Makruhnya Pak, saya ingin mendengar makruh terkait dengan pangan. Oh, umpamanya kita bicara ayam broiler, kita bicara ayam layer. Tadi saya senang ID Food punya apa punya GPS, punya PS jangan dicurigai, itu adalah perusahaan pemerintah plat merah. Kalau perlu memang menguasai



karena tidak mungkin plat merah mau jadi mafia kan begitu. Contohnya kalau GPS ini 400.000, Pak, *nah* 400 ribu, Pak, kenapa tidak dikendalikan, yang 300.000 dikuasai siapa plat merah, Pak, Berdikari, Pak, ID Food, Pak, yang 100.000 bisa dibagi ke yang lain. Biar apa? biar jelas, Pak. Kalau harga sekarang 13 ribu, 14 ribu jelas, iya toh. Pak Bapanas bisa, Pak ID Food, Pak Berdikari tolong *dong* itu harganya sekian. Tolong dikurangin *dong*, tolong di *cutting dong* kan begitu. Kalau mereka, Pak, Bapak tahu *enggak*, Pak bahwa mereka GPS digedor dikasih banyak, Pak mereka tidak mengikuti, Pak PS-nya itu ke mana, Pak. DOC-nya ke mana *enggak* diikuti, Pak, mereka yang penting jualan pakan, Pak. Saya suka juga ID Food bikin pakan untuk ternak karena plat merah, Pak, menguasai bahwa bisa membuat kebijakan yang benar, Pak. Jadi bukan seakan-akan pemerintah disalahkan cuman angkat tangan, Pak, cuma bisanya intervensi cuma teriak-teriak, Pak. harganya tetap saja petani.

Harga yang bagaimana, saya tidak melihat regulasi yang baik mungkin dari Bapanas pemikiran besar bahwa pangan ini seperti apa sih saya pengen dihitung bahwa pangan kita produksi oh berapa sih BOP-nya semuanya, oh ditambahin harga pinjaman bank itu dengan bunga bank berapa sih, Pak, kasih harga yang baik, Pak. Kalau Bapak ngasih harga yang baik, Pak semua akan dikerjakan. Milenial *enggak* usah disuruh, Pak, pasti kerja ke sana, bagaimana dihitung itu jadi duit, Pak, kerja di situ, itu pak. Kalau kita sudah kotor, sudah bulukan, panas-panas, keringetan *enggak* wangi, Pak buat beli parfum *enggak* bisa, bagaimana pemuda mau bekerja ke sana pasti tidak mau tapi saya pengen Bapanas punya *roadmap* yang besar ke sana begitu, *roadmap* yang besar.

Kalau kita bicara oh sapi tadi sapi impor. Bagaimana tidak impor begitu maksud saya. Kapan dimulai, *wong* sampai 2024 pak sampai 2005, 2025 Pak, *roadmap* saya seperti ini, Pak begitu. Tidak ada, Pak. Ini datangkan tadi *wah* kita kurang ya datangkan Brazil, daging dari Brazil. Apa Bapak tidak menghitung nantinya kalau datangkan daging dari Brazil bahwa 300.000, Pak efeknya ke sapi peternak petani itu berapa, Pak, efeknya apa, besar itu, Pak, 1.000 per kilo hidup, 2.000 per kilo hidup buat sehari sekali, Pak. Kita bicara daging kerbau datang terus, Pak, itu efeknya ke petani seberapa. Tolong bagaimana itu jalan keluar *roadmap*-nya, Pak Bapanas sebagai regulator seperti apa. Seperti umpamanya ini tambah oh ini layer begini *nih*. Harga telur sekian, ya tolong dikuasai GPS-nya, Pak, di plat merah, Pak. Saya juga pelaku, Pak tapi saya juga tidak suka kalau seperti itu begitu karena saya bukan kolonial, Pak begitu itu *enggak* baik, Pak untuk rakyat juga. Bagaimana rakyat ini sejahtera jangan mereka dikejar...

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Pelaku apa, Pak? Pelaku apa?

**F-PDIP (H. SUNARNA, S.E., M.Hum.):**

Pelaku apa saja. Saya, Bu ya *toh* bisa pelaku pangan apa saja. Saya pelaku gabah juga bisa tapi gabah itu kalau diinjak terus bicaranya jangan

alasan inflasi, Pak. Inflasi ada tapi kalau rakyat petani tidak sejahtera bahagia atau mboten kira-kira Pak Kepala Badan? senang apa pak? *Lah*, tapi kalau *jenengan* menginjak lagi 4.000 sekian lagi itu namanya nginjak lagi. Sudah keringetan enggak jelas, mereka sakit-sakit ke sawah, Pak. Sekarang Bapak boleh cek, Pak, tanah dengan harga yang sekarang 6.000, Pak, *jenengan* cek, tanah yang sekarang kosong ditanami, Pak. Kalau kemarin dibiarkan, Pak santai-santai.

Saya sangat berharap Bapanas punya *roadmap* yang besar, apa permasalahan yang ada sekarang bahwa Bapanas bisa oh saya akan melakukan regulasinya seperti ini. Oh, ini *enggak* jelas gonjang-ganjing terus ayam broiler, saya di regulasinya seperti ini. Oh, ini impor sapi, oh daging, saya harus impor daging sapi, bagaimana swasembada itu dalam 2 tahun, 3 tahun seperti apa begitu, Pak. Regulasi besar itu yang sangat kita harapkan tapi bukan kecil-kecil seperti ini, Pak, bukan kecil-kecil yang ujungnya tidak jelas. Mimpinya saja tidak, Pak, mimpi untuk ke depan saja tidak apalagi kalau bicara swasembada, cukup saja enggak usah swasembada cukup saja, itu yang kita harapkan.

Semua di pangan ini kalau Bapak bisa memberikan regulasi harga yang baik, pasti rakyat akan terjun dengan sendirinya. Kedelai harga baik pasti juga akan kemudian. Kita tanah kita luas, Pak. Kalau orang Jowo, Pak, kalau orang ndeso, Pak. Bapak saya tanahnya kecil, tetangga saya tanahnya luas, kalau kaya yang tanahnya kecil, Pak, itu aneh. Negara kita luas, Pak, tapi mosok sama negara yang kecil lebih kaya mereka, itu salah, Pak. Jadi itu menjadi pemikiran kita bahwa kita duduk ini untuk membawa ke arah yang benar untuk kesejahteraan rakyat.

Sekian terima kasih, Bu Ketua, matur nuwun.

Merdeka!

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Oke sami-sami.

Bu Nur'Aeni, silakan.

**F-PD (HJ. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):**

Baik.

Terima kasih, pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
Selamat sore,  
Salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan yang saya hormati beserta Anggota Komisi IV,

Pak Kepala Badan Pangan Nasional beserta Bapak-Bapak Birektur baik Bulog maupun ID Food.

Langsung dari saya yang pertama kaitan dengan apa yang disampaikan pada rapat ini, tentu memberikan saran masukan karena Bapanas ini kan akan mendapatkan kewenangan kaitan komoditi perikanan. Ini tentu dari sisi kewenangan dan pendelegasian juga harus masuk dari Kementerian Perikanan dan Kelautan karena kaitan dengan peran fungsi meningkatkan produksi perikanan adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mohon ini juga untuk bisa di apa diperbaiki, Pak Kepala Badan.

Yang berikutnya memberikan apresiasi atas apa yang disampaikan kaitan dengan *roadmap* kedaulatan serta ketahanan pangan yang sudah menjabarkan secara konsep itu yang diusulkan rekomendasi dari Komisi IV. *Alhamdulillah*, sudah dijabarkan hanya saja memang saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Fraksi PKS bahwa dari beberapa *roadmap* kebijakan yang akan diambil ini sepertinya masih kurang sempurna, masih belum berdasarkan apa *output* yang akan didapatkan dari kebijakan program yang sudah disampaikan oleh Bapanas ini. Tentu ini juga mengacu pada evaluasi daripada kebijakan program yang sudah dilakukan tahun 2022. Ternyata di 2022 kemarin Bapanas sendiri belum mampu untuk bisa mengimplementasikan kegiatan program pemanfaatan ketersediaan dan stabilisasi pasokan-pasokan dan apa harga pangan nasional kita. Sementara itu beberapa gejolak yang terjadi di kaitan pangan yang terjadi di tahun 2022 saja kan, sudah nampak di mata kita akan tetapi Bapanas sendiri belum mampu mengeksekusi itu hanya mampu menyerap kegiatan program tersebut di angka 76,4%. Tentu ini berpengaruh terhadap nanti ke depan kebijakan apa yang akan diambil. Kami akan dukung, Pak, dorong terhadap kebijakan program yang Bapak susun sesuai mungkin apa yang menjadi kendala di masyarakat kita khususnya baik ketersediaan maupun stabilisasi harga pangan kita.

Berikutnya, ini saya juga ingin menanyakan juga ya baik oleh Bulog dijawab ini maupun dari Bapanas kaitan dengan harga beras yang sampai saat ini tidak mengalami penurunan. Sementara itu Bulog memiliki kebijakan melakukan impor 500.000 ton kemarin ya untuk bisaantisipasi ketersediaan beras kita. *Nah*, apa yang akan dilakukan walaupun Pak Kepala Bapanas sudah menyampaikan, menyampaikan bahwa pasokan beras impor itu belum membanjiri pasar-pasar tradisional. Apakah ada jaminan apabila beras impor ini membanjiri pasar tradisional ini akan menurunkan harga beras kita? Apa yang akan dilakukan strategi dan kebijakan apa yang akan diambil oleh Bapanas untuk bisa menurunkan kembali harga beras yang di pasar tradisional kita yang menyebabkan angka inflasi kita yang semakin naik.

Berikutnya, saya juga ingin mendalami dan menanyakan harga acuan pembelian baik di tingkat produsen maupun di tingkat penjualan, di tingkat konsumen. Kebijakan apa yang akan dilakukan oleh Bapanas mengingat bahwa walaupun harga acuan pembelian sudah ditetapkan oleh pemerintah akan tetapi di pasar ini, Pak, harga penjualan kepada konsumen ini lebih tinggi daripada harga acuan pembelian yang dilakukan oleh produsen. Kita kemarin melakukan sidak di Serang, di pasar tradisional Serang khusus saja komoditas

minyak sayur di mana minyak sayur di harga pasaran di tingkat konsumen itu melambung tinggi, tidak sesuai dengan harga acuan pembelian. Belum lagi bicara kedelai, Pak, ini melambung tinggi. Sementara harga acuan pembelian yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini kan di bawah harga penjualan di tingkat konsumen. Apa yang bapak akan lakukan untuk mengatasi persoalan tersebut?

Terakhir saya juga ingin mungkin menyampaikan bahwa untuk usulan anggaran, Ibu Ketua, sebaiknya memang nanti kita bahas kembali supaya kita juga tidak terburu-buru ingin yakin dulu apa yang mereka anggarkan dan saya setuju salah satunya programnya menangani *stunting*, Bu Ketua.

Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

*Walaikumsalam.*

Baik.

Terima kasih Bapak/Ibu sekalian.

Semua respons, tanggapan dan pertanyaan, klarifikasi sudah diberikan dari para Anggota kepada Bapak Kepala Badan, Pak Direktur Utama Bulog dan Pak Direktur Utama ID Food. Tentu membutuhkan jawaban yang lebih jelas. Kalau terakhir banyak yang mempertanyakan tentang program, itu sebenarnya sama yang dipertanyakan Pak Ketua tadi bagaimana memastikan program-program itu memang akan berjalan dengan baik, bagaimana teknisnya, mekanisme seperti apa dan sejauh mana itu bisa dirasakan oleh masyarakat.

Saya persilakan Pak Arief untuk memberikan tanggapannya. Monggo.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Terima kasih, Ibu Pimpinan.

Saya coba jawab mungkin secara umum tetapi ini penting sekali. Jadi yang pertama mengenai anggaran, anggaran ini untuk gaji dan Tukin saja *enggak* cukup, Bu. Jadi 103 miliar itu tidak cukup. Jadi kalau tidak dikoreksi ya itu memang tidak cukup makanya ada info ke Bu Endang bahwa Tukin belum keluar, itu memang nanti ke depan kita akan alami itu. Oleh karena itu...

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Pimpinan. Pimpinan. Saya minta berapa gaji dan Tukinnya Kepala Badan?

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Gaji saya, gaji saya 10 juta, Tukinnya kurang lebih 30 juta dan saya sempat tidak gajian 7 bulan, Bapak. Saya *enggak* perlu cerita begini sebenarnya tapi karena Bapak tanya katanya harus jujur. Jadi waktu dari Dirut BUMN jadi Kepala Badan itu sebenarnya merah putih kalau Pak Buas sampaikan begitu tapi saya ingin Bapak/Ibu semua paham bahwa ini ada yang kita perjuangkan.

Kemudian mengenai harga pembelian dan penjualan. Harga pembelian itu sebenarnya kita buat boleh *enggak* ditayangkan harga pembelian mulai dari jagung, ayam, telur.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Silakan, Pak, ditayangkan saja supaya lebih jelas.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Badan Pangan Nasional ini kelebihanannya dua. Yang pertama, mengatur harga di hulu, yang kedua mengatur harga di hilir. *Nah*, seperti ini contohnya. Untuk membuat peraturan badan seperti Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2022, ini kita duduk seluruh *stakeholder* pangan mulai dari Kementan, Kemendag, pelaku usaha, asosiasi itu duduk bareng, petani, peternaknya kemudian daerah sentra produksi. Berapa sih HPP jagung itu ada *cost structure*-nya Bu, ada *cost structure*-nya sehingga misalnya harga modal jagung atau beras Rp2.000,00 misalnya. Kemudian ongkos angkut, ongkos... itu didetailkan satu persatu sehingga didapatkan harga jagung pipil kering dengan kadar air sekian begitu ya itu sampai kita putuskan Rp4.200,00. Kemudian berapa harga di peternak itu kita tetapkan, ini bersama-sama semua tetapi juga secara fair di hilir juga harus dijaga sehingga inflasi yang harus kita jaga sama-sama ini *related* dengan daya beli masyarakat sehingga hulu dan hilir ini harus dijaga, *enggak* boleh ego maunya kita. Tadi seperti Bapak/Ibu sampaikan petaninya yang *gede dong* gabah kalau boleh 6.000 *dong* terus nanti daya beli di hilir tanggung jawab siapa. Ini juga harus kita pikirkan sama-sama sehingga posisi yang baik adalah harga yang wajar di mana petani mendapatkan keuntungan yang wajar, pedagang mendapat keuntungan yang wajar dan di hilir konsumen juga tidak terberatkan.

*Nah*, komposisi ini, itu yang kami di Badan Pangan coba *created* ya dan ini *alhamdulillah*, Bu kalau ditanya regulasi Bu Kiki, kami sudah buat sekitar 16 peraturan badan, mungkin bisa ditampilkan ya peraturan, Peraturan Badan Nomor 5, Nomor 11 itu semua sudah mengatur jadi dalam tempo 8 sampai 10 bulan, Bu Kiki itu banyak sekali yang sudah kita kerjakan untuk meregulasi ini semua sambil kita menyiapkan 2 BUMN Pangan kita ini ya, Bulog dan ID Food memiliki CPP dan CPP-nya juga *alhamdulillah* sudah selesai. Ini kalau Bapak/Ibu yang saya hormati ini peraturannya sudah segini ya. Kalau ada orang bilang peraturan harusnya di-*reduce* disederhanakan di sini ada

mengatur penyelenggaraan-penyelenggaraan karena memang harus dibuat supaya garisnya benar.

Mengenai cadangan, cadangan beras, cadangan jagung, cadangan kedelai, stabilisasi pasokan dan harga, kerawanan pangan, sistem peringatan dini kerawanan pangan dan gizi, ini semua dibuat dalam waktu yang sangat tepat dan ini koordinasi antar kementerian dan lembaga dan ada harmonisasi-harmonisasi. Jadi keluarnya satu per badan itu atau Perpres itu melibatkan banyak kementerian dan lembaga.

Berikutnya lagi mengenai Pasar Induk Beras Cipinang. Kenapa sih harga beras *enggak* turun-turun, kan tadi sudah kita sampaikan bahwa... coba tolong dilihat KSA Kerangka Sampel Area dari Badan Pusat Statistik. Tolong. Di sini Bapak/Ibu. Mau Bulog nggerojok berapa banyak, kalau kondisinya seperti ini dan stok itu tidak dikuasai dan memang produksinya itu kurang, itu ya akan seperti hari ini Bapak/Ibu kecuali kalau kita punya kebijakan Bulog kita tingkatkan stok levelnya. Misalnya Bu Endang, kita tingkatkan Bulog 3 juta ton ya, ayo kita mulai sekarang bicara ketersediaan mau menjaga harga stok levelnya kita naikkan, bisa, sangat bisa tetapi saya mohon dengan Bapak/Ibu semua di forum yang baik ini, kasih Bulog ya hilirisasinya juga. Jangan seperti awal tahun lalu atau beberapa tahun terakhir Bulog punya stok tetapi tidak bisa hilirisasi. Terus nanti Bulog mengajukan *reimbursement* turun mutu. Sampai hari ini kami *tuh* pengennya Pak Slamet kalau Bulog punya stok menyerap tadi di *floor price*-nya itu kita sudah siapkan tapi hilirisasinya juga dibuka. Jadi program-program pemerintah yang berkaitan dengan pangan tolong kasih ke badan pangan, kita *open book* sama-sama kita lihat ya sehingga ekosistemnya itu...

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Boleh saya sela? Untuk isu ini kita juga sering sudah berbicara dan Komisi IV merekomendasikan bahkan, memaksa, Pak Buas ya ingat ya saya juga termasuk yang kenceng ngomong ini, harus ada hilirisasi. Terus kalau ngomong ke kita terus kita ngomong ke siapa *wong* kita sudah ngomong kayak begitu *kok*. Kita sudah merekomendasikan bahkan di beberapa kali kesimpulan juga sudah ada itu hilirisasi tentang Bulog ini.

**F-PKS (drh. H. SLAMET):**

Bagus. Ibu izin, *enggak*, bagus saya pikir Bu karena beliau masih baru dan badan ini baru nanti kesimpulan di *bold* dengan tinta merah. Saya pikir *enggak* ini juga perlu diulang siapa tahu begitu ya dengan kan dulu anggaphlah ini kesimpulan di Bulog, sekarang kan naik ke badan nih kita masukin saja kesimpulan itu. Mudah-mudahan itu keinginan kita sebenarnya yang disampaikan...

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Iya ya kita sudah berkali-kali juga ngomong kayak gitu, Pak. Silakan, Pak Arief.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Pimpinan, tambah sedikit sini, di sini, di sini ya.

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Oh Pak SDK, silakan.

**F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):**

Ini yang saya harapkan. Ini yang saya harapkan jawaban Saudara tapi di dalam *roadmap* Saudara ini tidak ada. Coba tingkatkan kapasitas Bulog supaya ada bisa mengendalikan beras, tidak dikendalikan oleh mafia ya tapi di sini tidak ada di sini, ini apa yang di sini bikin neraca 36 miliar mau dia apa neraca 36 miliar.

Terima kasih, Pimpinan.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Begini Bapak, pada saat saya membuat *roadmap* itu adalah gambaran secara umum dan besar. Pada saat Bapak ingin mendetailkan satu persatu apa yang akan dikerjakan Bulog apa yang akan dikerjakan ID Food, itu kita punya sesi berikutnya kalau memang diperlukan. Misal kami tugaskan Bulog 2,4 juta ton, 2,4 juta ton itu perhitungannya adalah 1,2 juta ton itu untuk stabilisasi pangan. Kemudian berikutnya adalah sisa 1,2 juta ton, itu dipersiapkan untuk stok berikutnya, *enggak* seperti hari ini kurang cuma 500.000 ton, kita impor sudah begitu datangnya terlambat lagi karena izin-izinnya apa semua. Jadi kalau diputuskan sekarang prosesnya lama dan ini tadi saya laporkan ke Pak Presiden langsung. Kalau tata kelolanya seperti ini, kita *enggak* akan berubah. Tadi kalau Pak Ketua tanya defisit atau *enggak* ya akan menjadi positif jadi begini tahun 2022 itu surplus 1,46 juta, tahun 2021 1,3 juta tapi kalau surplusnya sampai 4,8 atau 7 atau 9 juta ton, itu menambahkan tahun-tahun berikutnya.

*Nah*, sekarang kita mau sepakat seperti apa mau 2 tahun kita *cut off* karena *enggak* mungkin 2 umur beras 2, 3 tahun masih ada itu menurut saya sudahlah berasnya sudah turun mutu begitu ya. Jadi kembali kepada tadi harga pembelian, harga penjualan berapa stok level yang ideal. Coba tolong dilihatkan neraca pangan tadi Pak Ketua menyampaikan di depan. Ini semua kalau Bapak/Ibu dari Komisi IV cermati, stok awal kemudian perkiraan produksi dalam negeri, ketersediaan, kebutuhan, neraca, neraca kemudian rencana impor, ini sebenarnya sudah ada semua sehingga kalau kita bicara

ketersediaan, ketersediaan itu nomor satu adalah produksi dari dalam negeri. Jadi pastinya Kementerian Pertanian seperti yang Bapak/Ibu sampaikan.

Kemudian kita bicara ketersediaan. Pada saat tidak cukup produksi dalam negeri, kita melakukan ketersediaan dari luar. Memang demikian hari ini kejadiannya begitu dan yang dikasih segitiga merah itu adalah produk-produk yang memang kita masih ketergantungan impor kecuali beras tadi ya, Pak, karena itu polemik antara iya dan tidak surplus 1,4 juta tetapi kita memerlukan untuk cadangan pangan di Bulog. Sebagai contoh kedelai, kedelai itu produksinya bukan 700.000, Pak, kedelai itu produksinya 300.000 begitu. Kemudian kebutuhannya di sini terlihat 2,7 juta. Pada saat kita merencanakan rencana impor 2,5 juta, kami inginnya partisipasi Bulog di situ sehingga BUMN kita yang namanya Bulog itu harusnya punya cadangan padi, jagung dan kedelai.

**INTERUPSI F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Interupsi Pimpinan. Boleh?

**WAKIL KETUA RAPAT (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M./WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI):**

Ya silakan.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Mohon maaf, Pak Arif dari tadi saya mencoba menyimak. Yang Bapak sampaikan di forum ini begitu, apakah Bapak sampaikan juga pada saat Bapak Ratas karena begini, Pak. Kami di sini fungsinya mendorong melalui fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan fungsi legislasi. Eksekutif itu Bapak bagian dari eksekutif harusnya bisa *dong* mengeksekusi ini. Mohon koreksi saya apabila saya salah. Jadi maksudnya, konkretnya saja jangan berputar-putar apa begitu *loh* kebijakan apa. Misalkan memang Bapak merasa Bulog ini harusnya dikuatkan ya seperti apa ID Food seperti apa begitu. Apakah ini disampaikan atau tidak di Ratas, Bapak.

Terima kasih.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Pak Buas, Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Menko Perekonomian itu setiap rapat pasti memberikan saya waktu untuk jelaskan. Pastinya Bu Kiki ini sudah saya jelaskan semua, Bu Kiki.

Kemudian mengenai tadi hilirisasi Bulog itu juga baru tadi, ini ada Pak Buas di samping saya. Baru tadi saya sampaikan lagi. Saya juga *enggak* bosan-bosan menyampaikan hal-hal ini begitu ya karena hilirisasi itu penting. Kalau Bu, Pak Buas ini mengajukan 20.000 ton penurunan mutu begitu ya ekuivalen dengan 165 miliar kemudian berikutnya kena bunga bank dan nilai 185 miliar, itu kalau berasnya itu hilirisasinya benar *turnover*-nya benar itu



*enggak* akan terjadi. Jadi pada saat kita perlu beras di sisi lain, di sisi lain kita apa ya *ride off* ya *ride off* bahasanya turun mutu kemudian harus di *ride off*. *Nah*, yang seperti ini mungkin menurut hemat saya harusnya tidak boleh terjadi lagi ke depan...

**F-PG (ALIEN MUS):**

Pimpinan, sebentar.

Pak Arief, tadi kan baru selesai rapat ya dengan Presiden. Kasuistik tentang beras turun mutu di Bulog itu karena hilirisasi yang tadinya sebelumnya itu bisa diserap oleh Mensos bagi-bagi Raskin dan sebagainya dan ini sudah tidak terjadi lagi. Apakah hal tersebut juga disampaikan atau tidak begitu sehingga kita bisa mengetahui persis karena kalau memang tidak berarti langkah-langkah yang Bapak sampaikan tadi juga saya pikir ya harus ada lagi pembaruan-pembaruan informasi begitu.

Terima kasih.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Terima kasih, Ibu Alien.

Saya ada di sini karena profesionalitas saya, Bu. Jadi yang seperti ini saya selalu sampaikan kepada pimpinan tertinggi, saya sampaikan kepada kementerian/lembaga dalam berbagai forum termasuk rapat tadi dengan Pak Presiden. Ada Pak Buas di sebelah saya dan saya melakukan terus. Jadi tidak perlu dikhawatirkan saya tidak menyampaikan, jadi saya sampaikan semua termasuk persiapan HBKN beras itu harus seperti apa, daging sapi seperti apa, daging kerbau seperti apa. Jadi hasil Rakortas yang ada kemudian membuat dibuat sebagai risalah, risalah itu yang kita pakai untuk Bapak/Ibu yang ada di sini untuk melakukan kegiatan misalnya kalau perlu ketersediaan dari luar tapi kalau risalah-risalah ini belum selesai, belum ada, Pak Buas *enggak* akan mulai. Pak Frans dengan ID Food-nya juga *ndak* akan mulai gitu. *Nah*, kecepatan kita dalam mengeksekusi ini, ini juga saya tadi juga sampaikan ada Pak Buas di samping saya tadi saya jelaskan itu.

Kemudian khusus untuk beras, coba tolong dilihat stok level di Pasar Induk Beras Cipinang. Pada saat stoknya 33.000 ton kemudian teman-teman di PIBC menyampaikan 25.000 ton ya, saya hari ini lebih miris lagi karena Pasar Induk Beras Cipinang stoknya sekarang 13.000 ton, Ketua. Apa yang saya sajikan ini *real* dan tidak dikurangi tidak ditambahi sehingga Bapak/Ibu semua saya minta tolong kepada Bulog, saya minta tolong kepada Direktur di Bulog, Dirut ya, tadi pun Pak Presiden sampaikan itu harus 30 sampai 40.000 ton. Jadi dari tadi saya sama Pak Buas diskusi, kemarin pun sudah diskusi dengan Gubernur PJ Gubernur DKI sudah siap tapi kan ini termasuk tugas dari kita semua bagaimana menyiapkan menggelontorkan jangan nyipratin beras Bulog ke Pasar Induk Beras Cipinang sebagai salah satu indikator.

Kemudian berikutnya karena perlu saya jelaskan juga mengenai ikan begitu ya. Sebenarnya sumber protein kita itu yang paling baik salah satunya adalah ikan, tidak memaksakan *red meat* begitu ya. Kenapa? karena memang ikan-ikan dari Indonesia Timur ini sangat baik. Kemudian mengenai ikan terutama ID Food, ID Food ini sudah memulai Tucato ya tuna, cakalang dan tongkol ya. Kemudian ini juga bisa menjadi sumber protein jadi *white meat* ini sebenarnya sangat mendukung.

Berikutnya lagi Bapak/Ibu mengenai *cost structure* dari setiap produk kita memang kita coba jabarkan walaupun di setiap daerah itu berbeda-beda.

Kemudian berikutnya lagi mengenai kearifan pangan lokal itu ada di program di B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman) ya termasuk *Isi Piringku* yang pernah saya sampaikan. Satu isi piring itu sebaiknya sepertiga adalah bahan pokok, kemudian sepertiga lagi adalah, coba lihat *Isi Piringku* ya ini juga kita *campaign* kita sampaikan berulang-ulang ya. Bagaimana kearifan pangan lokal seperti juga kita sampaikan seperti Maluku. Nah, ini *Isi Piringku*. Jadi ini yang ideal ini juga kita sampaikan bahwa sepertiganya sayuran, kemudian berikutnya, 1/6 adalah lauk-pauk kemudian 1/6 lagi adalah buah-buahan. Kalau Bapak lihat di bahan pokok Bapak/Ibu. Di bahan pokok itu tidak perlu, benar, Pak, tidak perlu beras semua se-Indonesia betul sekali. Ini yang kita sampaikan. Kalau di Maluku menggunakan sagu, ayo silakan gunakan sagu tetapi memang ada cadangan pangan kita di seluruh Bulog beras *in case* terjadi sesuatu itu bisa kita gunakan, Pak. Kemudian daerah mana yang memang proteinnya itu adanya telur, ya sudah telur. Jangan dipaksa makan daging ya, memang sudah ada di sana begitu. Jadi ini kearifan pangan lokal.

Berikutnya lagi, Pak, mengenai kerja sama antar kementerian dan lembaga. Kami juga kerjakan *kok* Bapak/Ibu. Misalnya untuk memfasilitasi distribusi pangan dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur, bekerjasama dengan teman-teman Kementerian Perhubungan dengan BUMN, itu juga kita kerjakan. Hanya khusus untuk pengiriman ke Indonesia Timur, Bapak/Ibu sebaliknya itu yang masih kosong sehingga memang harus ada yang didorong untuk produksi di wilayah Indonesia Timur begitu, Bu Endang. Ya, jadi saya rasa beberapa catatan ini, kami terima begitu ya tetapi khusus anggaran ya minimal gaji karyawan kami, gaji, Tukin dan lain-lain itu bisa dipenuhi karena kalau *enggak* kasihan juga. Bu Endang sudah tahu dapat dan itu meresahkan begitu ya.

Bapak/Ibu yang saya hormati,

Mungkin yang lainnya saya akan jawab dalam tertulis, izin Ketua tapi mungkin Pak Sestama atau Pak Deputi ada yang ingin ditambahkan, silakan terutama mengenai *stunting*.

**F-PKS (drh. H. SLAMET):**

Pak Ketua sedikit, Pak Ketua.

Pak Kepala Badan, jadi ini masukan saja memulai dari pembicaraan tentang makanan lokal *nih*. Saya sering *berseloroh* dengan teman-teman begitu ya ketika kita mendapatkan konsumsi di pesawat itu semua kan gandum begitu. *Nah*, tolong regulasinya dimulai saja di situ, hotel, jadi ketika ya kita semuanya semua hidangan yang kita terima di situ kan enggak ada makanan-makanan lokal, semua impor itu bahannya. *Nah*, ini masukkan saja saya pikir dimulai dari sini tidak hanya mau menekankan di daerah tetapi hotel kemudian pesawat dan lain-lain, boleh itu tapi sertakan yang makanan lokal.

Terima kasih, Pak Ketua.

**SESTAMA BADAN PANGAN NASIONAL:**

Baik, terima kasih.

Pak Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati dan kami banggakan,

Menambahkan dari apa yang dijelaskan oleh Pak Kepala Badan kaitan dengan apa yang disampaikan Bu Endang tadi kaitan dengan Perpres 22/2009. Perlu kami sampaikan bahwa Perpres Nomor 22 Tahun 2009 tersebut sudah tidak berlaku lagi, bu karena dalam Perpres tersebut tahapan pelaksanaan dan target road map hanya berlaku sampai dengan tahun 2015 sehingga kaitan dengan hal tersebut, Pak Kepala Badan sudah menyampaikan izin prakarsa untuk menyusun Perpres pengganti Perpres 22/2009 tersebut kepada Bapak Presiden dan sudah disetujui. Saat ini tahapannya sudah melakukan...

**KETUA RAPAT:**

Bunyinya apa Perpres itu?

**SESTAMA BADAN PANGAN NASIONAL:**

Perpres 22/2009 itu tentang Penganekaragaman Pangan, Pak. Kemudian kita mengajukan usul penggantinya Perpres Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya dan Kearifan Lokal dan sudah kami diskusikan dengan para pakar pangan, kemudian juga kami sudah melakukan dua kali putaran rapat dengan tim dengan tim PAK atau Panitia Antar Kementerian Lembaga sudah dua kali dan minggu depan rencana kami melakukan harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menggantinya.

Kemudian yang kedua kaitan dengan tadi Ibu Kiki bahwa anggaran yang kami usulkan 1,2 T, itu pusat dan daerah karena ternyata kalau kita baca Perpres 66/2021 ini badan pangan tidak hanya sebagai regulator tapi ada kegiatan-kegiatan...

**KETUA RAPAT:**

Kalau daerah maksudnya apa ini saya kurang paham ini.

**SESTAMA BADAN PANGAN NASIONAL:**

Jadi begini, Pak Ketua izin. Jadi Badan Pangan Nasional ini kan merupakan embrio dari Badan Ketahanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan itu mempunyai kaki-kaki Dinas Ketahanan Pangan di provinsi, kabupaten dan kota dan itu sampai saat ini masih kita bina karena bicara masalah pangan bukan hanya di pusat tapi juga harus di provinsi, kabupaten dan kota sehingga secara komprehensif diharapkan pangan secara nasional ini...

**KETUA RAPAT:**

Fungsinya apa nanti dengan mereka? Apa tugas, tugas, hak dan tanggung jawab mereka apa terhadap Badan Pangan Nasional?

**SESTAMA BADAN PANGAN NASIONAL:**

Jadi apa tugasnya sama kaitan dengan apa ketersediaan apa namanya stabilisasi pasokan dan harga pangan, kemudian kaitan dengan penganekaragaman pangan, kaitan dengan apa namanya kewaspadaan dan kerawanan pangan dan kegiatan-kegiatan lain yang memang kita laksanakan di pusat, Pak. Jadi di daerah pun kami memang sudah melakukan rapat teknis secara nasional dengan mengundang 514 kabupaten, kota dan provinsi sehingga kepanjangan tangan Badan Pangan Nasional untuk mengamankan pangan di daerah itu bisa dilanjutkan kira-kira seperti itu, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Kira-kira bisa jalan *enggak*?

**SESTAMA BADAN PANGAN NASIONAL:**

Bisa, Pak. Sementara ini...

**KETUA RAPAT:**

Anda yakin bisa jalan? Ayo...

**SESTAMA BADAN PANGAN NASIONAL:**

Saya yakinkan...

**KETUA RAPAT:**

Saya tanya sekali lagi, Anda yakin jalan?

**SESTAMA BADAN PANGAN NASIONAL:**

Yakin, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Yakin?

**SESTAMA BADAN PANGAN NASIONAL:**

Kita harus optimis ya, siap ya.

**KETUA RAPAT:**

Ya ingat ya kata-kata Sestama ini, dia yakin kalau ketahanan pangan daerah bisa apa yang ditugaskan.

**SESTAMA BADAN PANGAN NASIONAL:**

Iya, *Insyallah*, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Maka tadi kenapa saya tanya apa hak dan tanggung jawab. Kalau ada tanggung jawab berarti dia mempunyai hak. Sedangkan gaji mereka itu dari Anda atau dari Pemda?

**SESTAMA BADAN PANGAN NASIONAL:**

Dari Pemda, Pak.

**KETUA RAPAT:**

Yah, Bos. Maka saya tanyakan tadi kan apa hak dan tanggung jawab

**SESTAMA BADAN PANGAN NASIONAL:**

Tapi ada insentif yang kita berikan, Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Kita lihat saja nanti ya.

**SESTAMA BADAN PANGAN NASIONAL:**

Kemudian kait masih kaitan dengan tadi yang disampaikan Ibu Kiki bahwa pelaksanaan kegiatan itu diatur di dalam Pasal 12, Pasal 15 dan Pasal 18, Perpres 66/2021 bahwa tidak hanya sebagai regulator tetapi melaksanakan kegiatan-kegiatan di pusat dan tentunya berkaitan dengan daerah.

Kemudian dari Pak Made dan Bu Yessy, terima kasih dukungannya. Mudah-mudahan apa namanya tambahan anggaran ini juga bisa masuk dalam kesimpulan rapat RDP pada hari ini, walaupun mungkin misalnya jumlahnya

tidak sebesar itu tapi minimal kami bisa melakukan koordinasi secara teknis dengan teman-teman Dinas Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota.

Mungkin itu tambahan dari kami, Pak Ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Umumnya, umumnya ketahanan pangan itu menyatu dengan Dinas Pertanian, umumnya, karena beberapa wilayah itu ada yang jadi satu badan. Misalnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, bisa juga Dinas Pertanaman dengan Ketahanan Pangan umumnya, umumnya, itu jadi satu bahkan ada yang Pertanian dan Dinas Perkebunan. Ada juga Pertanian dan Dinas Perikanan. Ini perlu Anda ketahui bos dan Anda cek dulu, anggaran APBD di kabupaten umumnya kalau untuk Dinas Pertanian ataupun apa, umumnya, yang saya bicara umumnya ini, *enggak* sampai 20 miliar, kira-kira cukup apa. Ini yang perlu kita ketahui dulu ya. Ada lagi? Kalau *enggak* ada lagi tolong tampilkan tadi yang saya minta.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Sebentar saya tampilkan dulu.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Sebelum masuk kesimpulan, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Saya tampilkan dulu, bukan masalah kesimpulan. Ini kita lihat data yang dari Kementerian Pertanian ya supaya ini jelas. 2015 ya, Dirjen Tanaman Pangan mendapatkan 2,88 triliun. Produksi berasnya 43 juta ton, konsumsinya 29,18 juta ton, surplusnya 14,64 juta ton. Pak Sarwedi, *enggak* perlu nanti saya kasih anda catatannya, ini mungkin waktu itu Anda pun masih di Dirjen Tanaman Pangan atau *enggak* saya *enggak* tahu ini ya. Kemudian 2016 ya, produktivitas berasnya 46 juta ton, konsumsinya 28,82 juta ton, surplusnya 17 juta ton. Kita lihat, kalau surplus ini angka surplus... surplus... surplus berarti kan bertambah surplus ini surplus ini.

Terakhir misalnya 2018 ya, produksinya 33,9 juta ton beras, konsumsi beras 29,57 juta ton, surplusnya 4,37 ton tetapi impornya hampir 2,3 juta ton. Coba kita hitung surplus itu kan lebih atau saya yang bodoh, saya *enggak* mengerti. Setahu saya surplus itu lebih. *Nah*, terakhir 2021 ya produktivitas 31,36 juta ton, konsumsi 30 juta ton, surplusnya 1,31 juta ton. Terakhir ada saja impor 409.741 yang konon katanya beras khusus.

Terakhir 2022, produktivitas 31,94 konsumsi 30,20 juta ton, surplusnya 1,74 ton tapi ada impor ya *toh*, ini *loh*. Ini yang perlu kita ketahui ini ini data riil yang konon katanya surplus terbayang *enggak* dari 2015 sampai 2022 kurang lebih surplusnya hampir kurang lebih 5 sampai 7 juta ton surplusnya tetapi hari ini nyatanya defisit ya. Ini yang perlu kita ketahui dulu deh masalah data.

Silakan, Mbak Kiki.

**F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):**

Terima kasih, pimpinan.

Ini yang yang waktu terakhir juga kalau saya *enggak* salah ya Pak Buas tolong koreksi saya, waktu rapat terakhir, saya akan mempertanyakan juga dengan ID Food ya Pak Frans. Justifikasi importase itu loh justifikasinya parameternya *goal*-nya adalah stabilisasi harga. Faktanya, faktanya tidak pernah juga terjadi stabilisasi harga itu. Kita harus bicara yang realistis begitu. Jadi yang tadi mungkin Pak Ketua sampaikan surplus itu bicara angkanya berarti kembali lagi begitu. Kalau angka ini juga tidak menjadi parameter pemerintah dalam melaksanakan khususnya Bapanas dalam melakukan justifikasi importase dan lain-lain, kita jadi bingung apa fungsinya. Salah satu yang saya harapkan Bapanas ini ada justifikasi dan membuat parameter itu begitu loh supaya kita *clear*. Jadi jangan nanti ada *suudzon* kita masing-masing wah ini importase karena ya tadi Pak Suhardi mungkin sampaikan di-*mentioned* mafia... mafia... mafia dan mafia begitu *loh* jadi hal itu.

*Nah*, kedua ini saya bilang kenapa tadi Pimpinan tadi kan disampaikan 1,4 yang dibutuhkan kurang lebih 1,4 anggaran itu ya. Kalau memang ternyata gaji dan tukin, ya kebutuhannya gaji dan tukin saja dulu begitu *loh* jadi *step by step lah* jangan langsung tiba-tiba *bouncing*-nya itu angkanya luar biasa begitu. Jadi *at least* pertanggungjawabannya juga *enggak* ribet.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Cukup? Kalau sudah cukup saya hanya menjelaskan sedikit. Bantuan pangan non tunai sekarang kan *enggak* belum ambil beras sama Bulog *toh*, belum kan, Kemensos juga belum kan. Utang kurang bayar Kemensos sudah selesai? Belum. Berapa nilainya? 380 miliar. Masih macet

**F-PKS (drh. H. SLAMET):**

Bagus pakai mic Pak Buas biar didengar, pakai mic biar didengar.

**DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG (BUDI WASESO):**

Belum, Pak, jadi masih ada utang 380 miliar, Pak, untuk masalah...

**KETUA RAPAT:**

Utang itu *enggak* kena bunga ke Bulog?

**DIREKTUR UTAMA PERUM BULOG (BUDI WASESO):**

Bulognya kena bunga, Pak.

**KETUA RAPAT:**

*Enggak*, yang saya tanya kalau Kemensos utang Bulog, *enggak* kena bunga sementara Bulognya utang sama bank kena bunga. Luar biasa. Jangankan menyatukan Bulog, Kementerian Sosial, antar Eselon I di dalam kementerian mitra Komisi IV itu saja tidak bisa, sulit sekali. Misalnya Dirjen Tanaman Pangan dengan PSP, PSP dengan yang lain, itu sulit menyatukan itu saja sulit, apalagi menyatukan antar lembaga kementerian begitu, ya jadi.

**F-PKS (drh. H. SLAMET):**

Pak Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Ya.

**F-PKS (drh. H. SLAMET):**

Ini mudah-mudahan nanti kekhawatiran Pak Ketua dijawab dengan *blueprint* yang sudah dibuat oleh Badan Pangan, Pak, di terakhir itu nanti yang tadi saya minta itu, Pak. Mudah-mudahan itu terjawab kekhawatiran Pak Ketua terjawab dengan *blueprint* itu sehingga bisa berjalan baik, Pak Ketua. Pak Kepala Badan yang kita nanti minta *blueprint* yang itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya, terima kasih. Dengan demikian dari dialog diskusi masukan dengan Komisi IV, saya akan membacakan kesimpulan rapat pada rapat dengar pendapat sore ini.

1. Komisi IV mendengarkan penjelasan Badan Pangan Nasional mengenai *roadmap* dan rencana program kegiatan tahun 2023. Selanjutnya, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta kepada Badan Pangan Nasional melakukan tata kelola lapangan dengan berbasis pada sumber pangan di dalam negeri dan peningkatan kesejahteraan petani.

Anggota?  
Pemerintah?



**PEMERINTAH:**

Setuju.

**(KETUK PALU 1 KALI)  
(RAPAT:SETUJU)**

2. Komisi IV mendengarkan penjelasan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.282.729.435.000,00. Selanjutnya, Komisi IV meminta Badan Pangan Nasional dalam menyusun program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat...Kayaknya kata-kata ada yang *enggak* nyambung tuh... kepada masyarakat dan-nya saya rasa *enggak* perlu, dan-nya diganti harus teruku...Harus terukur... Harus terukur secara nasional sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah untuk mencapai kedaulatan dan kemandirian pangan.

Anggota? Anggota?  
Pemerintah?

**PEMERINTAH:**

Setuju ketua.

**(KETUK PALU 1 KALI)  
(RAPAT:SETUJU)**

**KETUA RAPAT:**

Yang terakhir ini sudah masuk kesimpulan rapat waktu tanggal 7 Desember tetapi tetap kami masukkan agar, agar pemerintah mengetahui bahwa dengan HPP Rp8.200,00 atau Rp8.300,00, *wassalam*, apabila Bulog bisa dapat beras ataupun gabah.

3. Komisi IV meminta pemerintah untuk mengevaluasi harga pembelian pemerintah gabah dan beras mengingat adanya penyesuaian harga BBM, pupuk bersubsidi dan transportasi agar Perum Bulog dapat menyerap beras dalam negeri secara maksimal.

Anggota?  
Pemerintah?

**PEMERINTAH:**

Setuju, Ketua.

**(KETUK PALU 1 KALI)  
(RAPAT:SETUJU)**

**KETUA RAPAT:**

Sebelum kami menutup rapat dengan pendapat hari ini, kami persilakan pada Badan Pangan atau Bulog untuk menyampaikan beberapa hal mengenai rapat dengan pendapat hari ini. Kami persilakan.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL (ARIEF PRASETYO ADI):**

Terima kasih kepada Ketua, Pimpinan Komisi IV juga Bapak/Ibu Anggota, teman-teman dari BUMN.

Hasil dari RDP ini tentunya menjadi catatan kami untuk berbuat lebih baik tapi percayalah bahwa Badan Pangan Nasional ini memang sudah mempersiapkan dan akan terus mempersiapkan beberapa kegiatan-kegiatan ke depan yang tentunya perlu berkoordinasi dengan seluruh kementerian dan lembaga termasuk juga dengan teman-teman Komisi IV. Malah tadi saya sudah bisik-bisik dengan teman-teman di BUMN, harus nanti izin kita akan *visit* sama-sama ke beberapa lokasi. Kemudian berikutnya lagi, Ketua, kami memang perlukan anggaran itu supaya Badan Pangan ini bisa terasa *impact*-nya terutama sampai dengan ke daerah-daerah itu kami perlu dukungan dari seluruh Anggota dan Ketua Komisi IV.

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah rapat dengar pendapat pada hari ini.

Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV, mohon maaf apabila kami selama memimpin dalam rapat ini ada kekurangan, kekhilafan.

Dengan mengucapkan *alhamdulillahirobbilalamin*, rapat dengar pendapat ini kami tutup.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(KETUK PALU 3 KALI)  
(RAPAT DITUTUP PUKUL 17.46 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

**Drs. ACHMAD AGUS THOMY**  
NIP. 196508171988031002